PERAN UN WOMEN DALAM IMPLEMENTASI *OASIS PROGRAMME* MELALUI *JORDAN RESPONSE PLAN* TERHADAP PERLINDUNGAN PENGUNGSI PEREMPUAN SURIAH DI YORDANIA TAHUN 2023-2025

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

VANESA AMELIA PUTRI

22323254

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

PERAN UN WOMEN DALAM IMPLEMENTASI *OASIS PROGRAMME*

TERHADAP PERLINDUNGAN PENGUNGSI PEREMPUAN SURIAH DI

YORDANIA TAHUN 2023-2025

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

VANESA AMELIA PUTRI

22323254

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Peran UN Women dalam Implementasi *Oasis Programme* melalui *Jordan Response Plan* terhadap Perlindungan Pengungsi Perempuan Suriah di Yordania Tahun 2023–2025

Oleh:

Vanesa Amelia Putri
(22323254)

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

16 September 2026

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Derina Faslig Silitonga, S.Hub.Int., M.H.I.	
2	Elyana Ade Pertiwi, S.Hub.Int., M.A.	
3	Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

28 Agustus 2026,



Vanesa Amelia Putri

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK....4
DAFTAR ISI....5
DAFTAR TABEL....7
DAFTAR GAMBAR....8
DAFTAR SINGKATAN....9
ABSTRAK....10
ABSTRACT*....*11
BAB I
PENDAHULUAN....1
1.1 Latar Belakang....1
1.2 Rumusan Masalah....8
1.3 Tujuan Penelitian....8
1.4 Cakupan penelitian....9
1.5 Tinjauan Pustaka....9
1.6 Kerangka Pemikiran....11
1.7 Argumen Sementara....14
1.8 Metode Penelitian....15
1.8.1 Jenis Penelitian....15
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian....15
1.8.3 Metode Pengumpulan Data....15
1.8.4 Proses Penelitian....16
1.9 Sistematika Pembahasan....16
BAB II
SEJARAH DAN KONDISI PENGUNGSI SURIAH....18
2.1 Konflik Suriah dan Faktor-Faktor Pendorong Perpindahan Penduduk Suriah ke Yordania....19
2.2 Kondisi Pengungsi Suriah setelah berada di Yordania....21
2.3 Respons dan Upaya Pemerintah terhadap kondisi Pengungsi Suriah di Yordania....25
2.3.1 Jordan Response Plan sebagai Kerangka Respon Nasional....27
2.4 Dasar Kerja Sama UN Women dan Pemerintah Yordania....29
2.5 UN Women dan Oasis Programme sebagai Strategi Perlindungan Perempuan Pengungsi....30
BAB III
IMPLEMENTASI PERAN UN WOMEN MELALUI OASIS PROGRAMME DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN PENGUNGSI SURIAH DI YORDANIA....35
3.1 Analisis Pendekatan Enforcement UN Women dalam Implementasi Oasis

Programme bagi Perempuan Pengungsi Suriah di Yordania..... 36
3.1.1 Naming & Shaming..... 37
3.1.2 Sanction.....38
3.2 Analisis Pendekatan Management UN Women melalui Oasis Programme dalam Melindungi Perempuan Pengungsi Suriah di Yordania.....40
3.2.1 Monitoring sebagai Instrumen Management UN Women dalam Perlindungan Perempuan Pengungsi Suriah di Yordania.....41
3.2.2 Capacity Building melalui Pelatihan Keterampilan, Cash-for-Work, dan Dukungan Psikososial oleh UN Women di Yordania.....46
3.2.2.1 Pelatihan Keterampilan..... 46
3.2.2.2 Cash-for-Work.....48
3.2.2.3 Dukungan Psikososial..... 51
3.3 Analisis Pendekatan Normative UN Women dalam Implementasi Oasis Programme bagi Perempuan Pengungsi Suriah di Yordania..... 53
3.3.1 Authority dan Legitimacy UN Women dalam Implementasi Oasis Programme terhadap Pengungsi Suriah di Yordania.....54
BAB IV
PENUTUP.....60
4.1. Kesimpulan..... 60
4.2 Rekomendasi.....62
DAFTAR PUSTAKA..... 63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Pengungsi Suriah di Negara-Negara Penerima Utama, 2025.....3
Tabel 1.2 Three Approaches to Compliance Enforcement, Management, and Normative.....12
Tabel 2.1 Jumlah Korban Jiwa Tahunan Perang Saudara Suriah.....20
Tabel 4.1 Kesimpulan.....60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Za'atari Refugee Camp..... 22
Gambar 2.2 Azraq Refugee Camp..... 22
Gambar 2.3 Perempuan Pengungsi Menjalankan Program Cash-for-Work/Workshop..... 33

DAFTAR SINGKATAN

UNHCR	: United Nations High Commissioner for Refugees
JRP	: Jordan Response Plan
MoPIC	: Ministry of Planning and International Cooperation
SDGs	: Sustainable Development Goals
3RP	: Regional Refugee & Resilience Plan
NGO	: Non-Governmental Organization
UNICEF	: United Nations Children's Fund
SRAD	: Syrian Refugee Affairs Directorate
ARDD	: Arab Renaissance for Democracy and Development
EFE	: Education for Employment
GRES	: Gender Results Effectiveness Scale
JPOSC	: Jordan Partnership and Outreach Support Centre
JNCW	: Jordanian National Commission for Women
JONAP	: Jordan’s National Action Plan on Women, Peace and Security
MoSD	: Ministry of Social Development
ACTED	: Agency for Technical Cooperation and Development
CEDAW	: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

ABSTRAK

Krisis pengungsi Suriah di Yordania menimbulkan berbagai persoalan bagi perempuan pengungsi, seperti kekerasan berbasis gender, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, rendahnya kesempatan kerja, serta tekanan psikososial. Penelitian ini menganalisis implementasi *Oasis Programme* yang dijalankan UN Women bagi perempuan pengungsi Suriah di Kamp Za'atari dan Azraq pada periode 2023-2025 melalui *Jordan Response Plan*. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi, laporan institusional, jurnal akademik, dan publikasi terkait. Kerangka pemikiran penelitian mengacu pada teori implementasi organisasi internasional Joachim, Reinalda, dan Verbeek, dengan menguji ketiga pendekatan yang ditawarkan dan memusatkan analisis pada pendekatan *management* dan *normative* setelah pendekatan *enforcement* dinilai tidak dominan. Argumen sementara penelitian menyatakan bahwa UN Women menjalankan perannya dalam implementasi *Oasis Programme* melalui pemantauan kebutuhan penerima manfaat dan peningkatan kapasitas dengan pelatihan keterampilan, program *cash-for-work*, dukungan psikososial, serta pemanfaatan otoritas dan legitimasi organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Oasis Programme* meningkatkan akses perlindungan, keterampilan, pendapatan, dan partisipasi sosial perempuan pengungsi. Namun, dampaknya masih dibatasi oleh keterbatasan pendanaan, norma patriarki, akses kerja, stigma kesehatan mental, dan keberlanjutan program.

Kata kunci: Oasis Programme, pengungsi, perempuan, Suriah, UN Women, Yordania

ABSTRACT

The Syrian refugee crisis in Jordan presents various challenges for refugee women, including gender-based violence, limited access to healthcare and education, scarce employment opportunities, and psychosocial stress. This study analyzes the implementation of the Oasis Programme, conducted by UN Women for Syrian refugee women in the Za'atari and Azraq camps during the 2023–2025 period through Jordan Response Plan. Employing a qualitative method, the study utilizes secondary data derived from official documents, institutional reports, academic journals, and relevant publications. The conceptual framework draws upon the international organization implementation theories of Joachim, Reinalda, and Verbeek, testing all three approaches and concentrating the analysis on the management and normative approaches after the enforcement approach is found not to be dominant. The study's preliminary argument posits that UN Women executes its role in the Oasis Programme by monitoring beneficiary needs and enhancing capacity through skills training, cash-for-work programs, and psychosocial support, while leveraging the organization's authority and legitimacy. Findings indicate that the Oasis Programme improves refugee women's access to protection, skills development, income, and social participation. However, its impact remains constrained by limited funding, patriarchal norms, restricted access to employment, mental health stigma, and challenges regarding program sustainability.

Keywords: *Jordan, Oasis Programme, Syria, Refugee, Women, UN Women*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis pengungsi di dunia merupakan salah satu masalah yang paling mendalam di abad ke-21. Konflik di Suriah dimulai pada tahun 2011 sebagai salah satu bagian dari gelombang protes Arab Spring, semuanya bermula ketika masyarakat Suriah melakukan aksi demonstrasi di Kota Daraa untuk mendesak pemerintah melakukan reformasi politik dengan tuntutan mengakhiri rezim Presiden Bashar al-Assad yang bersifat otoriter (BBC News 2014).

Awalnya, demonstrasi berlangsung secara damai, tetapi kemudian berkembang menjadi bentrokan setelah aparat keamanan menggunakan kekerasan untuk membubarkan massa. Tindakan represif tersebut juga ditandai dengan penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap para demonstran di Suriah (Phillips 2016).

Situasi konflik yang berkelanjutan tersebut membuat warga sipil memiliki urgensi untuk mencari pengungsian keluar dari Suriah seiring meningkatnya intensitas kekerasan yang juga menyasar wilayah permukiman sipil. Peningkatan intensitas kekerasan tersebut tercermin dalam adanya penggunaan senjata kimia dalam penyerangan, pengepungan terhadap kota-kota besar seperti Aleppo dan Ghouta, peluncuran bom terhadap kawasan pemukiman sipil, serta pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia *(human rights)* yang dilakukan secara masif menjadikan Suriah sebagai salah satu wilayah dengan krisis kemanusiaan yang terburuk di era modern atau tepatnya di abad ke-21 (Gunawan et al. 2023). Akibat dari situasi tersebut, warga sipil dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka demi

alasan keamanan dan untuk menyelamatkan nyawa, baik dengan mengungsi ke daerah-daerah lain dalam negeri maupun mengungsi ke negara-negara lainnya.

Terdapat beberapa negara yang menjadi tujuan para pengungsi seperti Turki, Lebanon, Irak, dan Yordania. Hingga 31 Agustus 2025, data UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) menunjukkan bahwa sekitar 4,7 juta pengungsi Suriah masih berada di lima negara tersebut (UNHCR and World Bank 2025). Jumlah pengungsi tidak terdistribusi secara merata. Türkiye menjadi negara yang menampung pengungsi Suriah terbanyak, disusul Lebanon, Yordania, Irak, dan Mesir. Jika dilihat dari banyaknya pengungsi yang diterima, Yordania berada pada posisi ketiga dalam menampung pengungsi Suriah di kawasan.

Namun, signifikansi kasus Yordania terletak pada besarnya beban yang harus ditanggung dibandingkan kapasitas negaranya. Dengan jumlah penduduk sekitar 11 juta jiwa serta keterbatasan sumber daya, khususnya air dan lapangan kerja, Yordania termasuk negara dengan proporsi pengungsi per kapita yang sangat tinggi di dunia. Selain itu, terdapat perbedaan yang cukup besar antara estimasi pemerintah mengenai jumlah warga Suriah yang tinggal di Yordania, yakni sekitar 1,3 juta orang, dan jumlah yang tercatat secara resmi oleh UNHCR yang berkisar 600.000 orang pada awal 2025 (Jordan Times 2025).

Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa banyak warga Suriah berada di luar sistem registrasi resmi sehingga tidak dapat mengakses berbagai bentuk bantuan dan layanan kemanusiaan. Situasi tersebut berdampak lebih besar terhadap kelompok rentan, terutama perempuan, karena membatasi akses mereka terhadap layanan kesehatan maupun perlindungan sosial.

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Pengungsi Suriah di Negara-Negara Penerima Utama, 2025

Negara	Jumlah pengungsi Suriah terdaftar (2025)	Dasar pencatatan
Türkiye	± 2,3 juta (akhir 2025)	Pendaftaran Pemerintah Türkiye (perlindungan sementara)
Lebanon	± 532.400 (akhir 2025)	Pendaftaran UNHCR, ± 700.000 diketahui UNHCR namun tidak terdaftar formal
Yordania	± 420.800 (akhir 2025); ± 600.000 (awal 2025)	Pendaftaran UNHCR, total warga Suriah ± 1,3 juta menurut Pemerintah Yordania
Irak	± 308.200 (akhir 2025)	Pendaftaran UNHCR
Mesir	Di bawah 150.000	Pendaftaran UNHCR

Sumber: diolah dari UNHCR dan World Bank (2025); Jordan Times (2025)

Pengungsi Suriah memilih Yordania sebagai salah satu tujuan utama karena secara geografis negara ini berbatasan langsung dengan Suriah, sehingga sejak konflik meletus pada 2011 Yordania menjadi tujuan pengungsian yang relatif terjangkau. Di sisi lain, stabilitas politik Yordania yang relatif terjaga dibanding negara-negara tetangganya menjadikan negara ini sebagai lokasi strategis bagi lembaga internasional untuk menjalankan berbagai program kemanusiaan (Saleh et al. 2018).

Data Per Juni 2025, tercatat lebih dari 586.600 pengungsi terdaftar pada UNHCR di Yordania, dengan 81% di antaranya tinggal di komunitas tuan rumah dan 19% sisanya berada di Kamp Za’atari dan Azraq. Dari sekitar 111.000 pengungsi yang tinggal di kedua kamp tersebut, sekitar 67.000 orang berada di

Za’atari dan sisanya di Azraq, termasuk sekitar 6.000 orang yang tinggal di Village 5, yaitu zona dengan pengawasan keamanan ketat dan pembatasan pergerakan yang lebih besar (European Commission 2025; UNHCR 2025). Perempuan dan anak-anak mencakup lebih dari separuh populasi pengungsi di Yordania.

Kedua kamp menghadirkan bentuk kerentanan yang berbeda bagi perempuan. Za’atari, yang dibangun pada 2012 merupakan kamp terbesar, karena adanya *overcrowding* terdapat beberapa masalah yang ditimbulkan seperti risiko keamanan, ketegangan sosial, pelecehan seksual dan akses layanan yang terbatas (Al-Hourani et al. 2019). Azraq, yang dibangun pada 2014 dengan perencanaan zonasi yang lebih tertib, menghadapi persoalan yang berbeda, yaitu keterpencilan lokasi dan pembatasan pergerakan yang ketat. Kondisi tersebut mempersempit jaringan sosial yang biasanya menjadi sumber dukungan ketika kekerasan terjadi (Hoffmann 2017). Beban Azraq bertambah setelah penutupan Emirati Jordanian Camp pada akhir Juni 2025, yang mengakibatkan relokasi sekitar 1.150 pengungsi ke kamp tersebut (European Commission 2025).

Kondisi kerentanan tersebut semakin diperparah oleh terbatasnya akses terhadap pekerjaan dan pendidikan. Partisipasi perempuan pengungsi Suriah dalam pasar kerja di Yordania tercatat sangat rendah, yaitu sekitar 7%, sedangkan tingkat partisipasi laki-laki mencapai sekitar 59% (Sahin Mencutek and Nashwan 2021). Selain itu, hanya sekitar 18% penghuni Kamp Za’atari dan Azraq yang berada dalam kelompok usia produktif, sehingga tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup lebih banyak ditanggung oleh sebagian kecil populasi yang dapat bekerja (UNHCR 2025).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan pengungsi Suriah di Yordania menghadapi risiko kekerasan yang cukup tinggi. Hasil penilaian cepat yang dilakukan atas permintaan *United Nations Population Fund* (UNFPA) di tiga gubernuran serta Kamp Za'atari dan Azraq menunjukkan bahwa 69% responden dan informan melihat adanya peningkatan kasus kekerasan berbasis gender. Bentuk kekerasan yang paling sering dilaporkan adalah kekerasan emosional dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan maupun anggota keluarga (Toukan, 2023).

Jordan Population and Family Health Survey 2017-2018 mencatat bahwa sekitar 29,5% perempuan berusia 15 - 49 tahun yang pernah menikah mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional dari suami maupun pasangan mereka. Dalam bidang pendidikan, partisipasi anak-anak pengungsi Suriah menunjukkan penurunan yang signifikan seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Jika pada tingkat dasar angka partisipasi mencapai sekitar 90% , pada tingkat menengah angkanya turun menjadi sekitar 25-30% (Small 2020).

Pada 2025, International Rescue Committee memperingatkan bahwa penyusutan layanan kesehatan di Kamp Za'atari menempatkan ibu dan bayi baru lahir dalam risiko, termasuk berkurangnya akses terhadap persalinan yang aman dan perawatan pascapersalinan (*International Rescue Committee* 2025).

Dalam konteks inilah, peran Organisasi Internasional seperti UN Women sebagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokusnya pada permasalahan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menjadikan UN Women berperan secara strategis dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh pengungsi perempuan Suriah. UN Women bukan hanya memberikan

perlindungan dalam kapasitasnya sebagai Organisasi Internasional tetapi juga memberikan akses pendidikan, keterampilan, dan mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan yang dapat meningkatkan ekonomi mereka selama berada di pengungsian. Salah satu program UN Women di Yordania yaitu mengoperasikan beberapa pusat Oasis yang dilaksanakan di kamp Azraq dan Za'atari yang difokuskan untuk pengungsi perempuan dan kelompok rentan (UN Women 2024).

Oasis Programme didirikan pada tahun 2012 oleh UN Women untuk mengatasi hambatan gender dan mempromosikan pemberdayaan ekonomi, serta memberikan keterampilan terhadap para perempuan, sehingga mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja masyarakat. Program ini menyediakan ruang yang aman dan inklusif yang menawarkan pekerjaan yang disertai insentif tunai, keterampilan seperti menjahit, serta lokakarya tentang kesadaran kekerasan berbasis gender. Hingga saat ini, terdapat 22 kamp Oasis di seluruh Yordania termasuk Kamp Za'atari dan Azraq untuk memberdayakan pengungsi Suriah dan perempuan rentan Yordania. Program ini didanai oleh Uni Eropa melalui Dana Madad (*EU Regional Trust Fund*) dan didukung negara-negara donor seperti Australia dan Kanada, Oasis juga bekerja sama dengan Kementerian Pengembangan Sosial Yordania (UN Women 2024).

Periode 2023-2025 dipilih karena merupakan masa krusial bagi keberlangsungan program perlindungan pengungsi di Yordania. Tahun 2023 menjadi titik awal penting karena bertepatan dengan dimulainya *Jordan Response Plan* (JRP) kerangka nasional yang menyelaraskan respons darurat dan pembangunan inklusif dalam menangani krisis Suriah (Ministry of Planning and

International Cooperation (MoPIC) 2023). Urgensi penelitian ini terletak pada perubahan penting yang terjadi selama periode penelitian. Pertama, dukungan pendanaan internasional untuk penanganan pengungsi di Yordania mengalami penurunan. Kebutuhan pendanaan dalam *Jordan Response Plan* 2025 ditetapkan sebesar 1,6 miliar dolar Amerika Serikat, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 1,953 miliar dolar (Jordan Times 2025; Ammon News 2025). Penurunan ini berpotensi mempengaruhi berbagai program perlindungan yang bergantung pada bantuan donor, termasuk *Oasis Programme*.

Kedua, jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024 mendorong perubahan fokus kebijakan dari perlindungan pengungsi menuju proses pemulangan ke Suriah. Hingga akhir September 2025, lebih dari 157.000 pengungsi Suriah yang terdaftar di UNHCR Yordania telah kembali ke negara asalnya (UNHCR, 2025a). Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan pengungsi karena keputusan untuk kembali sering kali ditentukan oleh keluarga dan tidak selalu mempertimbangkan keinginan atau kebutuhan perempuan.

Berkurangnya pendanaan dan perubahan fokus kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan hasil perlindungan dan pemberdayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Kondisi ini menjadikan periode 2023–2025 sebagai waktu yang penting untuk menilai sejauh mana organisasi internasional mampu mempertahankan upaya perlindungan bagi perempuan pengungsi Suriah di Yordania.

UN Women sebagai organisasi internasional memiliki peran strategis dalam menciptakan ruang aman sekaligus memperluas akses perempuan pengungsi Suriah terhadap pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan hukum di Yordania. Meski demikian, implementasi program-program tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari faktor sosial-budaya hingga keterbatasan dukungan kebijakan lokal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma internasional yang dibawa oleh UN Women dengan realitas di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana peran UN Women dapat memberikan dampak nyata bagi perempuan pengungsi dalam konteks perlindungan dan pemberdayaan di Yordania.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Peran UN Women dalam Implementasi *Oasis Programme* melalui *Jordan Response Programme* terhadap Perlindungan Pengungsi Perempuan Suriah di Yordania Tahun 2023–2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi kondisi pengungsi perempuan Suriah di Yordania pada periode 2023-2025.
2. Untuk menganalisis implementasi *Oasis Programme* melalui *Jordan Response Plan* terhadap perlindungan pengungsi perempuan Suriah di Yordania pada periode 2023-2025.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini berfokus pada *Oasis Programme* bagi perempuan pengungsi Suriah di Kamp Zaatari dan Kamp Azraq, Yordania, dengan menyoroti intervensi ekonomi, sosial, psikologis, dan perlindungan, seperti pelatihan keterampilan, dukungan psikososial, edukasi hak-hak perempuan, serta akses pendidikan dan layanan kesehatan. Periode 2023-2025 dipilih karena tahun 2023 menjadi awal implementasi berbagai strategi perlindungan dan respons pengungsi yang diperbarui di Yordania, termasuk pelaksanaan *Jordan Response Plan* 2023–2025 yang menjadi kerangka utama penanganan krisis pengungsi Suriah. Sementara itu, tahun 2025 dipilih sebagai batas akhir penelitian karena pada periode tersebut terjadi perubahan penting dalam konteks pengungsian Suriah di Yordania, seperti berkurangnya pendanaan internasional dan meningkatnya arus pemulangan pengungsi ke Suriah setelah perubahan situasi politik di negara asal mereka.

1.5 Tinjauan Pustaka

Jurnal ini menjelaskan bagaimana kondisi pengungsi perempuan Suriah di Yordania dan Lebanon melalui media massa selama periode 2011-2016 yang dimana itu adalah puncak krisis pengungsi Suriah. Mereka mengkaji bagaimana media massa Yordania (Petra) dan Lebanon (*National News Agency*) menggambarkan kondisi pengungsi Suriah. Petra menyoroti aspek pemberdayaan, sementara *National News Agency* lebih menekankan penderitaan dan kebutuhan pengungsi. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pentingnya media dalam membentuk opini publik serta memperkuat atau mengurangi stigma terhadap kelompok rentan seperti pengungsi perempuan (Haider et al. 2021).

Penelitian ini membahas *Gender Based Violence* (GBV) yang dialami oleh perempuan pengungsi Suriah di Yordania. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab *Gender Based Violence* serta hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengakses layanan perlindungan. Beberapa faktor seperti sosial, ekonomi , dan perlindungan hukum yang menyebabkan terjadinya *Gender Based Violence*. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan, psikososial, dan minimnya fasilitas ramah perempuan, serta ketidakjelasan perlindungan hukum pengungsi. Penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama multisektor dan reformasi kebijakan untuk perempuan pengungsi (Navarrete 2019).

Penelitian ini menunjukkan bahwa program ini meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan kewirausahaan, dan pendapatan perempuan, serta memberikan harapan dan peluang setelah mengalami konflik. Penelitian ini menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan melalui pelatihan dan dukungan sosial untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial (Jabbar and Zaza 2016).

Meskipun ketiga penelitian sebelumnya memberikan kontribusi penting dalam menggambarkan kondisi perempuan pengungsi Suriah, terdapat aspek yang belum dibahas secara mendalam. Belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis perkembangan pelaksanaan *Oasis Programme* pada periode 2023-2025 dengan cakupan Kamp Zaatari dan Kamp Azraq serta berbagai bentuk intervensinya. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan *Oasis Programme* oleh UN Women dalam memberikan pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan pengungsi Suriah di Yordania.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Organisasi Internasional untuk mengkaji peran UN Women dalam pelaksanaan program pemberdayaan bagi perempuan pengungsi Suriah di Yordania pada periode 2023–2025. Sebagai aktor internasional non-negara, UN Women berperan aktif dalam mengembangkan dan menjalankan berbagai inisiatif yang dirancang melalui kolaborasi dengan pemerintah Yordania dan mitra internasional, untuk menjawab kebutuhan khusus kelompok perempuan yang terdampak konflik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada karya Jutta Joachim, Bob Reinalda, dan Bertjan Verbeek berjudul *International Organizations and Implementation: Enforcers, Managers, Authorities?* (Joachim et al. 2008). Buku ini membahas peran Organisasi Internasional dalam mengimplementasikan perjanjian, kebijakan, serta komitmen internasional di tingkat negara. Para penulis mengatakan bahwa Organisasi Internasional bukan hanya berfungsi sebagai instrumen negara, melainkan merupakan aktor independen yang memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika politik global, khususnya dalam tahapan implementasi kebijakan yang menggunakan tiga pendekatan utama dalam dalam pelaksanaan kebijakan internasional:

Tabel 1.2 ***Three Approaches to Compliance Enforcement, Management, and Normative***

	Enforcement Approach	***Management Approach***	***Normative Approach***
Resources	● *Naming and Shaming, judging on the basis of state reporting, expert*	● *Monitoring on the basis of state reporting, expert committees, inspections,*	● *Authority and legitimacy*

	committes, inspections or NGO reports	*or NGO reports*	
	• *Sanctions, economic or military sanctions, adjudication financial penalties, or naming and shaming*	• *Capacity building and problem solving through expert advice, rule interpretation, financial or technical assistance*	

Source : (Joachim, Reinalda, and Verbeek)

Berdasarkan tabel diatas terdapat tiga pendekatan yaitu ***enforcement approach***, ***management approach*** dan ***normative approach*** menurut Joachim, Reinalda dan Verbeek ;

Pertama, ***Enforcement approach*** adalah pendekatan yang berfokus pada pemberlakuan pengawasan ketat dan penerapan sanksi terhadap negara yang melanggar perjanjian internasional. Dalam pendekatan ini terdapat *naming and shaming*, yaitu menggunakan laporan negara, komite ahli, inspeksi, atau laporan lembaga swadaya masyarakat untuk menilai kepatuhan. Negara yang tidak patuh dapat diberi tekanan publik, misalnya melalui kritik atau sorotan negatif di forum internasional. Selain itu, pendekatan ini juga menggunakan sanksi, yaitu memberlakukan hukuman ekonomi, militer, atau finansial, termasuk denda, embargo, atau bahkan pengucilan diplomatik. Tujuannya adalah memaksa negara untuk patuh melalui konsekuensi langsung.

Kedua, yaitu ***Management approach*** yang mana pendekatan ini lebih bersifat mendukung dan membangun kapasitas daripada menghukum. Dalam pendekatan ini terdapat *monitoring*, yaitu memantau pelaksanaan norma melalui

laporan negara, komite ahli, inspeksi, atau laporan lembaga swadaya masyarakat untuk mendapatkan data akurat tentang kepatuhan. Selain itu juga terdapat *capacity building and problem solving,* yaitu memberikan bantuan teknis, finansial, atau konsultasi ahli, termasuk interpretasi aturan dan saran profesional agar negara dapat memenuhi norma. Fokus pendekatan ini adalah pembinaan kemampuan dan penyelesaian masalah, bukan sanksi.

Ketiga, ***Normative approach*** adalah pendekatan yang berfokus pada otoritas dan legitimasi. Dalam pendekatan ini, negara atau lembaga internasional memanfaatkan *authority,* yaitu kemampuan suatu aktor untuk memperoleh kepatuhan pihak lain tanpa menggunakan paksaan maupun imbalan material dan *legitimacy,* yaitu persepsi atau anggapan umum bahwa tindakan suatu aktor bersifat pantas dan patut dalam suatu sistem norma dan nilai yang dibangun secara sosial. Hubungan keduanya bersifat saling menopang dan mengandalkan keyakinan moral serta penerimaan norma oleh negara.

Ketiga pendekatan tersebut diuji terhadap karakteristik kasus yang diteliti. Enforcement approach mensyaratkan adanya kewenangan untuk menilai kepatuhan dan menjatuhkan konsekuensi, baik berupa sanksi ekonomi dan finansial maupun tekanan reputasional melalui naming and shaming. Dalam kasus ini, prasyarat tersebut tidak terpenuhi karena UN Women bukan badan pengawas traktat dan tidak memiliki kewenangan menilai kepatuhan negara.

Setelah pengujian tersebut, *management approach* dan *normative approach* dinilai lebih sesuai untuk menjelaskan peran UN Women. Kedua pendekatan tersebut relevan dengan pelaksanaan *Oasis Programme* yang

dilakukan melalui kerja sama, pemberian bantuan, peningkatan kapasitas, serta penyebaran nilai kesetaraan gender. Sementara itu, *enforcement approach* tidak digunakan karena tidak terdapat mekanisme sanksi atau tekanan dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, kedua pendekatan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis bagaimana peran UN Women dalam *Oasis Programme* terhadap perlindungan perempuan pengungsi Suriah di Yordania tahun 2023-2025.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan teori implementasi organisasi internasional Joachim, Reinalda, dan Verbeek, penelitian ini berargumen bahwa UN Women menjalankan perannya dalam implementasi *Oasis Programme* melalui pendekatan *management* dan *normative*. Melalui pendekatan *management*, UN Women melakukan monitoring dan *capacity building* melalui pelatihan keterampilan, *cash-for-work*, serta dukungan psikososial untuk mengurangi kerentanan ekonomi dan psikososial perempuan pengungsi Suriah. Sementara itu, melalui pendekatan *normative*, UN Women menggunakan *authority* dan *legitimacy* sebagai organisasi internasional untuk mendukung penerimaan dan pelaksanaan program bersama pemerintah dan mitra lokal. Dengan demikian, peran UN Women melalui *Oasis Programme* berkontribusi terhadap perlindungan perempuan pengungsi, terutama melalui penguatan kapasitas ekonomi dan psikososial, meskipun implementasinya masih menghadapi keterbatasan struktural dan keberlanjutan program.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study research*). Menurut Lamont (2022), penelitian kualitatif menggunakan data non-numerik untuk memahami dan menginterpretasikan fenomena sosial secara mendalam. Desain studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu kasus, yaitu pelaksanaan *Oasis Programme* oleh UN Women bagi perempuan pengungsi Suriah di Yordania. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami pelaksanaan program secara mendalam dengan mempertimbangkan konteks sosial, kelembagaan, dan kondisi penerima manfaat.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah UN Women sebagai organisasi internasional yang melaksanakan *Oasis Programme* bagi perempuan pengungsi Suriah di Yordania. Sementara itu, objek penelitian adalah pelaksanaan *Oasis Programme* di Kamp Zaatari dan Kamp Azraq. Penentuan subjek dan objek tersebut dilakukan untuk membatasi cakupan penelitian agar analisis dapat dilakukan secara terarah dan mendalam.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis dokumen (*document analysis*) dengan memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber kredibel, seperti jurnal akademik, dokumen resmi, serta publikasi UN Women, pemerintah Yordania, dan organisasi internasional terkait. Artikel media dan laporan relevan juga digunakan

sebagai data pendukung. Menurut Lamont (2022), analisis dokumen merupakan salah satu teknik yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif Hubungan Internasional untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, program, dan praktik suatu aktor melalui sumber tertulis.

1.8.4 Proses Penelitian

Penelitian diawali dengan menentukan masalah dan tujuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data sekunder melalui analisis dokumen. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mengelompokkan informasi berdasarkan aspek-aspek pelaksanaan *Oasis Programme*, seperti pemberdayaan ekonomi, dukungan sosial dan psikologis, serta perlindungan. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjelaskan pelaksanaan dan perkembangan program, menarik kesimpulan, serta memberikan rekomendasi sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi ke dalam empat bab :

Bab I : Membahas Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Membahas mengenai sejarah dan faktor-faktor yang melatarbelakangi kondisi perempuan Suriah di Yordania, Respons dan Upaya pemerintah Yordania, serta gambaran Umum mengenai UN Women dan *Oasis Programme.*

Bab III : Menguji ketiga pendekatan implementasi organisasi internasional dari Joachim, Reinalda, dan Verbeek, kemudian menganalisis peran UN Women dalam implementasi *Oasis Programme* terhadap perlindungan perempuan pengungsi Suriah di Yordania tahun 2023–2025.

Bab IV : Kesimpulan mengenai hasil penelitian dari Bab I - bab III, yang juga mencakup rekomendasi penelitian selanjutnya.

BAB II

SEJARAH DAN KONDISI PENGUNGSI SURIAH

Bab ini membahas latar belakang terjadinya konflik Suriah yang mendorong masyarakat meninggalkan negaranya dan mengungsi ke berbagai negara tetangga, terutama Yordania. Selain itu, bab ini juga menguraikan kondisi yang dihadapi perempuan pengungsi Suriah selama berada di Yordania serta menjelaskan peran UN Women melalui *Oasis Programme* Sebagai salah satu upaya dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan pengungsi. Pembahasan tersebut dijelaskan sebagai dasar untuk memahami implementasi *Oasis Programme* yang akan dianalisis pada bab selanjutnya.

Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai sejarah konflik Suriah beserta faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Suriah terpaksa mengungsi. Selanjutnya, bab ini mengulas kondisi perempuan pengungsi Suriah di Yordania dari berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, pendidikan, keamanan, dan psikologis, yang menunjukkan kerentanan yang mereka hadapi selama berada di pengungsian. Pada bagian akhir, dibahas peran UN Women melalui *Oasis Programme* Sebagai strategi perlindungan yang diwujudkan melalui penyediaan layanan perlindungan, dukungan psikososial, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan pengungsi. Keseluruhan pembahasan dalam bab ini menjadi pijakan untuk menganalisis implementasi *Oasis Programme* dalam melindungi perempuan pengungsi Suriah di Yordania pada bab berikutnya.

2.1 Konflik Suriah dan Faktor-Faktor Pendorong Perpindahan Penduduk Suriah ke Yordania

Konflik Suriah berawal dari sekelompok remaja di kota Daraa yang menuliskan grafiti mengkritik pemerintah. dan tindakan tersebut direspon oleh aparat keamanan melalui penangkapan dan penyiksaan. Peristiwa ini memicu kemarahan masyarakat setempat. Demonstrasi pun muncul, awalnya dengan tuntutan terbatas seperti pembebasan para remaja dan reformasi kebijakan (Hinnebusch 2016).

Namun, tindakan represif pemerintah justru menyebabkan meluasnya aksi protes ke berbagai kota seperti Homs dan Aleppo. Dalam tahap ini, narasi konflik berubah dari sekedar tuntutan reformasi menjadi perlawanan terhadap rezim yang dianggap tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat (Phillips 2016).

Seiring meningkatnya kekerasan, sebagian masyarakat mulai mengorganisir diri dalam beberapa kelompok salah satu yang dikenal yaitu *free syrian army.* kehadiran kelompok ini menandai transformasi konflik dari demonstrasi sipil menjadi konflik bersenjata terbuka. pertempuran terjadi di berbagai wilayah perkotaan. kota yang awalnya menjadi pusat kehidupan sosial dan ekonomi berubah menjadi medan tempur. infrastruktur rusak, layanan publik terganggu, dan keamanan warga sipil semakin terancam (Lister 2015).

Konflik tersebut telah menelan banyak korban jiwa. Hingga 2024, lebih dari 546.000 orang termasuk warga sipil. Setiap angka mewakili seorang manusia

dengan keluarga, rumah, dan komunitas yang terdampak. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah korban jiwa per tahun sejak konflik dimulai.

Tabel 2.1 Jumlah Korban Jiwa Tahunan Perang Saudara Suriah

Time Period	***Combatants***	***Civilians***	***Grand Total***
2011 - 2015	236.466	117.747	354.213
2016 - 2020	91.640	49.517	141.157
2021 - 2024	10.116	23.299	33.415
Total	**347,082**	**199,068**	**546,150**

Source : (*Syrian Observatory for Human Rights* (SOHR)).

Serangan terhadap kawasan permukiman, pengepungan kota, dan penggunaan senjata kimia menjadikan Suriah salah satu wilayah dengan krisis kemanusiaan terburuk pada abad ke-21 (Human Rights Watch 2024). Dalam situasi tersebut, perempuan menghadapi bentuk kerentanan yang berbeda. Selain terdampak sebagai warga sipil, mereka menghadapi peningkatan risiko kekerasan berbasis gender berupa pelecehan, pemerkosaan, dan eksploitasi seksual (Asaf 2017).

Selain itu, dalam banyak kasus, perempuan juga terpaksa mengambil peran sebagai kepala keluarga setelah kehilangan suami atau anggota keluarga laki-laki, sehingga menanggung beban pengasuhan sekaligus pencarian nafkah (UNHCR 2014). Bagi kelompok ini, keputusan mengungsi bukan pilihan melainkan kebutuhan mendesak untuk mempertahankan hidup.

Pengungsi Suriah memilih Yordania sebagai tujuan pengungsian karena adanya berbagai faktor yang saling mendukung. Pertama, Secara geografis, Yordania berbatasan langsung dengan Suriah, sehingga perjalanan dari wilayah konflik menjadi relatif lebih singkat dan aman. Kedua, Yordania juga memiliki stabilitas politik yang lebih tinggi dibandingkan beberapa negara tetangga, sehingga pengungsi merasa memperoleh perlindungan dari ancaman kekerasan (Chatty 2017; Saleh et al. 2018).

2.2 Kondisi Pengungsi Suriah setelah berada di Yordania

Pemerintah Yordania pada awalnya masih mampu menampung pengungsi melalui komunitas lokal dan fasilitas sementara. Namun, seiring meningkatnya jumlah pengungsi secara signifikan, kapasitas tersebut tidak lagi memadai. Maka dari itu, didirikanlah *Za'atari Refugee Camp* pada tahun 2012 sebagai bentuk respons cepat terhadap meningkatnya jumlah pengungsi. kepadatan di Za'atari menimbulkan berbagai permasalahan baru, seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang tidak memadai, dan tekanan sosial di dalam kamp. Untuk mengatasi hal tersebut, dibangunlah kamp kedua, yaitu *Azraq Refugee Camp* pada tahun 2014 (Hoffmann 2017).

Kondisi kamp pertama kali hanya berupa tenda darurat di tengah gurun. Seiring waktu, berkembang menjadi lebih tertata dengan tempat tinggal semi permanen (karavan), pasar kecil, sekolah dan klinik. Namun tetap dengan ruang yang sempit dan ketergantungan tinggi pada bantuan (Albadra et al. 2017).

Gambar 2.1 *Za'atari Refugee Camp*



Gambar 2.2 *Azraq Refugee Camp*



(*Source : The Jordan Times*)

Realita kehidupan pengungsi yang berada di kamp Za'atari dan Azraq tidak sesederhana "aman dan tertampung" tetapi ada banyak kondisi yang cukup keras. seperti air yang sering dibatasi penggunaannya, listrik tidak selalu stabil, tempat tinggal sempit, satu keluarga berbagi ruang yang kecil (FAFO and UNHCR 2019; UNHCR 2024). Para pengungsi hanya bergantung kepada bantuan dari lembaga internasional seperti UN women dan lembaga lain, tetapi terkadang bantuan bisa berkurang karena dana internasional yang terbatas hal ini membuat hidup mereka dalam kondisi yang tidak pasti (Mustafa 2023; Marks 2024).

Selain kondisi yang memprihatinkan mencari penghasilan juga sulit untuk dilakukan karena lapangan kerja di dalam kamp sangat sempit, banyak yang tidak memiliki izin keluar kamp, upah yang rendah dan juga tidak stabil. Akibatnya banyak yang berhutang, anak-anak ikut bekerja, muncul praktik kerja informal yang rentan eksploitasi (Lenner and Turner 2019).

Keterbatasan akses pendidikan juga terlihat dari tingginya angka putus sekolah anak perempuan, terutama pada jenjang menengah, yang dipicu oleh tekanan ekonomi keluarga, norma sosial, serta praktik pernikahan dini. Berdasarkan data yang diberikan oleh *Human Rights Watch* menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan anak pengungsi Suriah menurun drastis pada tingkat menengah. Tingkat pendaftaran sekolah turun dari sekitar 90% pada pendidikan dasar menjadi hanya sekitar 25-30% pada pendidikan menengah di Yordania. Penurunan ini disebabkan oleh kemiskinan yang mendorong pekerja anak dan pernikahan dini, keterbatasan akses transportasi sekolah, serta kurangnya dukungan terhadap pendidikan menengah (Small 2020).

Maka dari itu, praktik pernikahan dini menjadi solusi bagi mereka, sebagian keluarga melihat pernikahan dini sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga sekaligus perlindungan bagi anak perempuan dari kekerasan di lingkungan pengungsian (UNICEF Jordan 2019). Terbatasnya akses pendidikan banyak anak perempuan yang putus sekolah, menimbulkan peningkatan kemungkinan mereka menikah di usia muda. Hal ini tidak terlepas dari kondisi perempuan di kamp Za’atari dan Azraq di Yordania yang berada dalam situasi rentan secara sosial dan ekonomi (UNHCR 2024).

Dalam kehidupan sehari-hari di kamp, perempuan seringkali harus tinggal dalam ruang yang sempit tanpa privasi yang memadai, di mana satu keluarga harus berbagi satu unit karavan. Kondisi ini meningkatkan kerentanan terhadap pelecehan dan kekerasan, terutama di area fasilitas air, kamar mandi bersama, atau saat mengambil bantuan logistik. Selain itu, keterbatasan pencahayaan dan keamanan di area beberapa kamp masih sangat minim membuat perempuan merasa tidak aman untuk beraktivitas di luar pada waktu tertentu (Alhasan and Kanaan 2025).

Jika dilihat dari sisi ekonomi, banyak perempuan yang tidak memiliki akses terhadap pekerjaan atau sumber penghasilan yang stabil selama tinggal di kamp. Keterbatasan mobilitas dan minimnya peluang kerja, serta kontrol yang masih didominasi oleh pihak laki-laki, membuat mereka sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan atau anggota keluarga laki-laki. Data menunjukkan bahwa di Yordania tingkat partisipasi angkatan kerja pengungsi perempuan Suriah hanya sekitar 7%, sedangkan laki-laki mencapai sekitar 59%, yang menunjukkan kesenjangan besar dalam akses terhadap pekerjaan (Sahin Mencutek and Nashwan 2021).

Sementara dari sisi psikologis, para pengungsi perempuan banyak mendapatkan tekanan mental yang signifikan akibat pengalaman traumatis selama konflik. Banyak di antara mereka mengalami trauma akibat perang, kehilangan anggota keluarga, atau menyaksikan kekerasan secara langsung. Studi menunjukkan bahwa tingkat gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan PTSD cukup tinggi di kalangan pengungsi Suriah, terutama

perempuan (Acartürk et al. 2018). Selain itu, kondisi kehidupan di kamp yang penuh keterbatasan dan ketidakpastian turut memperparah stres psikologis yang dialami. Kehilangan orang terdekat serta pengalaman kekerasan selama konflik juga menjadi faktor utama yang memperdalam trauma dan memperburuk kesejahteraan psikologis perempuan pengungsi (Kheirallah et al. 2022).

2.3 Respons dan Upaya Pemerintah terhadap kondisi Pengungsi Suriah di Yordania

Pemerintah Yordania melakukan berbagai upaya dalam menangani jumlah pengungsi Suriah yang terus meningkat akibat konflik di Suriah. Dalam menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Yordania tidak bekerja sendiri tetapi melakukan kerja sama dengan organisasi internasional seperti *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta organisasi Internasional dan Nasional (UNHCR Jordan, n.d.). Salah satu mekanisme yang digunakan pemerintah adalah *Jordan Response Plan* (JRP), yang menjadi kerangka untuk mengkoordinasikan respons terhadap dampak krisis Suriah di Yordania. Melalui mekanisme tersebut, respons terhadap pengungsi mencakup kebutuhan kemanusiaan sekaligus penguatan kapasitas dan ketahanan masyarakat yang terdampak oleh krisis (World Bank 2016).

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menangani pengungsi Suriah adalah melalui penyediaan tempat tinggal di kamp pengungsian. Pemerintah Yordania bekerja sama dengan UNHCR dalam pengelolaan *Zaatari Refugee Camp* dan *Azraq Refugee Camp*. Dalam pengelolaan kedua kamp tersebut, *Syrian*

Refugee Affairs Directorate (SRAD) bertanggung jawab terhadap keamanan dan regulasi pengungsi Suriah serta melakukan koordinasi dengan UNHCR (UNHCR Jordan, n.d.). Sementara itu, UNHCR menyediakan berbagai layanan di kedua kamp, termasuk perlindungan, tempat tinggal, layanan masyarakat, dan dukungan penghidupan bagi pengungsi.

Selain menyediakan tempat tinggal, pemerintah Yordania juga berupaya memenuhi kebutuhan dasar pengungsi melalui kerja sama dengan UNHCR dan berbagai lembaga lainnya. Respons tersebut mencakup beberapa bidang, seperti pendidikan, pangan dan kebutuhan dasar, kesehatan, tempat tinggal, perlindungan, dan pemberdayaan ekonomi (World Bank 2016). Dalam pelaksanaannya, UNHCR juga menyediakan layanan registrasi dan dokumentasi, perlindungan, serta bantuan kebutuhan dasar bagi pengungsi Suriah di Yordania (UNHCR Jordan, n.d.).

Di bidang ekonomi, Pemerintah Yordania turut berupaya memperluas akses pengungsi Suriah terhadap pekerjaan formal melalui *Jordan Compact* yang disepakati pada 2016. Kesepakatan ini mencakup perluasan akses terhadap izin kerja, peningkatan kesempatan kerja melalui investasi dan *Special Economic Zones*, serta penguatan akses perdagangan Yordania ke pasar Uni Eropa. Dalam pelaksanaannya, pemerintah memberikan sejumlah kemudahan bagi pengungsi Suriah untuk memperoleh izin kerja melalui penyederhanaan prosedur dan pembebasan biaya izin kerja pada periode tertentu (International Labour Organization 2017).

Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga sebagian pengungsi Suriah tetap bekerja di sektor informal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Yordania belum sepenuhnya menghilangkan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dan perlindungan pengungsi Suriah (International Labour Organization 2017). Dengan demikian, respons terhadap krisis pengungsi tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan organisasi internasional dalam memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan kelompok pengungsi.

2.3.1 *Jordan Response Plan* sebagai Kerangka Respon Nasional

Jordan Response Plan for the Syria Crisis (JRP) merupakan rencana yang dibuat oleh Pemerintah Yordania melalui *Ministry of Planning and International Cooperation* (MoPIC) untuk mengatur penanganan dampak krisis Suriah. JRP mulai dijalankan pada 2015 dan melibatkan pemerintah, badan-badan PBB, organisasi non-pemerintah, serta donor. Rencana ini menggabungkan bantuan kemanusiaan dengan program pembangunan. Dengan demikian, bantuan untuk pengungsi Suriah dan dukungan bagi masyarakat Yordania yang menjadi tuan rumah dapat dilakukan secara bersamaan (Ministry of Planning and International Cooperation 2023, 2025).

JRP memiliki peran penting karena menjadi salah satu dasar bagi pelaksanaan program UN Women di Yordania. Tidak ada perjanjian khusus antara UN Women dan Pemerintah Yordania yang secara langsung mengatur penanganan

pengungsi Suriah. Oleh karena itu, kerja sama keduanya berjalan melalui kerangka JRP. Program UN Women tercantum dalam rencana tersebut dan kebutuhan pendanaannya juga diajukan melalui kerangka yang sama (UN Women 2025). Jadi, hubungan UN Women dengan Pemerintah Yordania dalam menangani isu pengungsi Suriah lebih banyak dilakukan melalui perencanaan dan kerja sama bersama, bukan melalui perjanjian khusus yang mengikat secara hukum.

JRP juga mencakup program yang berkaitan langsung dengan perempuan pengungsi. Dalam bidang perlindungan, terdapat program untuk mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender. Sementara itu, bidang ekonomi dan mata pencaharian mencakup pelatihan keterampilan serta kesempatan kerja. Kedua bidang tersebut sejalan dengan kegiatan yang dilakukan UN Women melalui *Oasis Programme* (Ministry of Planning and International Cooperation (MoPIC) 2025; UN Women 2024).

Kondisi pendanaan JRP selama periode penelitian juga penting untuk melihat keberlanjutan Oasis Programme. Pada 2025, kebutuhan pendanaan JRP mencapai sekitar 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan kebutuhan pada 2024 yang mencapai 1,953 miliar dolar, atau turun sekitar 18,43% (Jordan Times 2025; Ammon News 2025). Penurunan pendanaan tersebut dapat memengaruhi program-program yang bergantung pada bantuan donor. Dengan demikian, berkurangnya pendanaan menjadi salah satu tantangan bagi keberlanjutan program Oasis.

2.4 Dasar Kerja Sama UN Women dan Pemerintah Yordania

Kerja sama antara UN Women dan Pemerintah Yordania dalam menangani perempuan pengungsi Suriah tidak didasarkan pada satu perjanjian khusus. Kerja sama ini memiliki beberapa dasar yang saling berkaitan. Dasar tersebut penting untuk melihat posisi UN Women dalam menjalankan *Oasis Programme* di Yordania. Dasar pertama adalah mandat dari PBB. UN Women dibentuk melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 64/289 tahun 2010 dengan tujuan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (UN Women 2024).

Kerja sama ini juga didukung oleh keikutsertaan Yordania dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan dukungannya terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan. Komitmen tersebut kemudian diterapkan melalui *Jordan's National Action Plan on Women, Peace and Security* (JONAP II) 2022–2025 (Jordan National Comission for Women 2023)(CEDAW 2012, 2017); (Jordan National Comission for Women 2023).

Dasar kedua adalah kerja sama antara PBB dan Pemerintah Yordania. Kerja sama ini dituangkan dalam *United Nations Sustainable Development Cooperation Framework* (UNSDCF) Jordan 2023–2028. Kerangka tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan berbagai program badan-badan PBB di Yordania. Berdasarkan kerangka ini, UN Women menyusun *UN Women Jordan Country Office Strategic Note* 2023–2027. Dokumen tersebut menyesuaikan program UN Women dengan kebijakan nasional Yordania, termasuk *Triple Modernization*

Agenda, National Strategy for Women in Jordan 2020–2025, JONAP II 2022–2025, dan *Jordan Response Plan for the Syria Crisis* (UN Women, 2025).

Dasar ketiga berkaitan dengan kerja sama langsung dalam pelaksanaan Oasis Programme. Di wilayah masyarakat Yordania, UN Women bekerja sama dengan Ministry of Social Development (MoSD). Melalui kerja sama tersebut, Oasis Programme dijalankan di 18 pusat komunitas MoSD yang tersebar di sebelas gubernuran. Sementara itu, di kamp pengungsian, Oasis Programme dilaksanakan bersama *Agency for Technical Cooperation and Development* (ACTED) dan dikoordinasikan dengan UNHCR serta *Syrian Refugee Affairs Directorate* (SRAD), khususnya di Kamp Za'atari dan Azraq. UN Women juga memiliki kerja sama dengan *Jordanian National Commission for Women* (JNCW) melalui beberapa *Partnership Agreement* yang berkaitan dengan program dalam Strategic Note 2023–2027 (UN Women 2024, 2025).

Namun, dukungan Pemerintah Yordania terhadap kerja sama ini memiliki batas tertentu. Dukungan tersebut tidak sepenuhnya terlihat dalam bidang hukum. Yordania masih belum mengubah sejumlah ketentuan dalam Personal Status Act dan Nationality Act yang sebelumnya mendapat kritik dari Komite CEDAW (CEDAW 2012, 2017).

2.5 UN Women dan *Oasis Programme* sebagai Strategi Perlindungan Perempuan Pengungsi

UN Women merupakan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki mandat untuk memajukan kesetaraan gender dan memberdayakan

perempuan di tingkat global. UN Women resmi dibentuk pada tahun 2010 melalui resolusi *United Nations General Assembly* (United Nations General Assembly 2010).

Dalam konflik ini, UN Women di Yordania berperan aktif dalam merespon kebutuhan perempuan pengungsi melalui beberapa program perlindungan dan pemberdayaan. UN Women melihat kondisi pengungsi perempuan di kamp seperti *Za'atari Refugee Camp* dan *Azraq Refugee Camp* yang berada dalam kondisi rentan, mulai dari resiko kekerasan berbasis gender, keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta ketergantungan berkepanjangan pada bantuan kemanusiaan (UN Women Jordan 2020). Ketergantungan jangka panjang pada bantuan kemanusiaan tersebut tidak terlepas dari kerangka kebijakan yang mengatur akses pengungsi Suriah terhadap pasar kerja formal di Yordania, yakni *Jordan Compact*.

Jordan Compact merupakan kesepakatan antara Uni Eropa dan Pemerintah Yordania yang ditandatangani pada tahun 2016. Melalui kesepakatan ini Uni Eropa menjanjikan hibah, pembiayaan konvensional, dan konsesi dagang kepada Yordania dengan syarat pemerintah membuka akses kerja formal bagi pengungsi Suriah, termasuk pembebasan biaya izin kerja pada sektor-sektor tertentu (Almasri 2021). Kerangka kebijakan inilah yang kemudian turut membentuk ruang gerak program-program perlindungan dan pemberdayaan ekonomi perempuan pengungsi di Yordania, termasuk program yang dijalankan UN Women.

Program yang dijalankan oleh UN Women sebagai strategi untuk perlindungan para perempuan pengungsi adalah *Oasis Programme* yang didirikan

pada tahun 2012 yang ditujukan sebagai ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan untuk mendapatkan layanan perlindungan, dukungan psikososial, serta pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi. Program ini diimplementasikan sebagai *Oasis Centres* (*safe place*) bagi para pengungsi perempuan karena melalui pusat ini, UN Women menyediakan berbagai instrumen program seperti, pelatihan keterampilan kerja, *cash-for-work,* dukungan psikososial, layanan perlindungan dari kekerasan berbasis gender, mekanisme rujukan hukum dan kesehatan bagi korban kekerasan (UN Women 2024)

Selain itu, *Oasis Centres* juga menjadi tempat bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, pelatihan kepemimpinan, dan peningkatan kesadaran mengenai hak-hak perempuan. Melalui pendekatan ini, program tidak hanya bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan, tetapi juga memperkuat ketahanan psikologis dan sosial mereka di lingkungan pengungsian (UN Women 2024).

Oasis Programme tidak hanya bersifat bantuan jangka pendek, tetapi juga menerapkan prinsip pemberdayaan komunitas. Dalam implementasinya, perempuan pengungsi tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan sebagai fasilitator, pekerja komunitas, maupun pengelola kegiatan di *Oasis Centres* (UN Women 2024). Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat komunitas.

Dari sisi dampak, *Oasis Programme* menunjukan peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan pengungsi. Misalnya, melalui program *cash-for-work,* perempuan tidak hanya menghasilkan uang untuk

memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga lebih terlindungi dari resiko eksploitasi dan kekerasan berbasis gender yang muncul karena tekanan ekonomi. Selain itu, layanan dukungan psikososial turut membantu perempuan dalam memulihkan trauma yang dialami selama konflik dan masa pengungsian, sehingga mampu memperkuat ketahanan baik pada tingkat individu maupun komunitas (UN Women 2015, 2016).

Gambar 2.3 Perempuan Pengungsi Menjalankan Program *Cash-for-Work/Workshop*



(*Source :* UN Women/Christopher Herwig)

Namun demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai tantangan. Terbatasnya pendanaan serta besarnya jumlah pengungsi membuat akses perempuan terhadap layanan *Oasis Centres* belum dapat dijangkau secara merata. Di samping itu, norma sosial dan budaya yang masih didominasi oleh nilai-nilai patriarki di sejumlah komunitas pengungsi turut membatasi keterlibatan perempuan, khususnya dalam aktivitas ekonomi dan peran kepemimpinan. Tingginya ketergantungan pada bantuan internasional juga menandakan bahwa

aspek keberlanjutan program masih menjadi tantangan utama dalam jangka panjang (Brück et al. 2024).

BAB III

IMPLEMENTASI PERAN UN WOMEN MELALUI *OASIS PROGRAMME* DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN PENGUNGSI SURIAH DI YORDANIA

Bab ini menganalisis bagaimana peran UN Women melalui *Oasis Programme* dijalankan dalam upaya melindungi perempuan pengungsi Suriah di Yordania. Analisis menggunakan kerangka implementasi organisasi internasional dari Joachim, Reinalda, dan Verbeek (2008), yang terdiri dari tiga pendekatan, yaitu *enforcement, management,* dan *normative*. Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk melihat bentuk peran UN Women berdasarkan data yang ditemukan dalam penelitian. Dengan cara ini, pendekatan yang digunakan dalam analisis ditentukan berdasarkan temuan penelitian, bukan berdasarkan asumsi sejak awal.

Pembahasan melihat terlebih dahulu pendekatan *enforcement* untuk mengetahui sejauh mana UN Women memiliki kewenangan dalam mendorong Pemerintah Yordania menjalankan komitmen terkait perlindungan perempuan pengungsi. Selanjutnya, pendekatan *management* digunakan untuk menjelaskan bagaimana UN Women menjalankan *monitoring* untuk mengidentifikasi kebutuhan perempuan pengungsi serta *capacity building* untuk meningkatkan kapasitas mereka melalui *Oasis Programme*. Pendekatan *normative* kemudian digunakan untuk melihat bagaimana nilai, standar, dan legitimasi UN Women mendukung pelaksanaan *Oasis Programme* bagi perempuan pengungsi Suriah di Yordania. Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk melihat peran UN Women

dari sisi kewenangan, pelaksanaan program, dan nilai atau norma yang mendukung perlindungan perempuan pengungsi.

3.1 Analisis Pendekatan *Enforcement* UN Women dalam Implementasi *Oasis Programme* bagi Perempuan Pengungsi Suriah di Yordania

Pendekatan *enforcement* dalam kerangka Joachim, Reinalda, dan Verbeek (2008) melihat kepatuhan sebagai sesuatu yang dapat didorong melalui pemberian konsekuensi ketika suatu pihak tidak memenuhi komitmen internasional. Dalam pendekatan ini, terdapat dua instrumen utama, yaitu *naming and shaming* dan sanksi. *Naming and shaming* dilakukan dengan menilai kepatuhan suatu negara melalui laporan, pemeriksaan, atau penilaian dari aktor internasional maupun organisasi non-pemerintah. Hasil penilaian tersebut kemudian dapat digunakan untuk memberikan tekanan reputasional kepada negara. Sementara itu, sanksi dapat berupa hukuman ekonomi, militer, maupun finansial.

Penerapan pendekatan *enforcement* dalam penelitian ini dilihat melalui tiga hal. Pertama, adanya kewajiban yang mengikat sebagai dasar untuk menilai kepatuhan. Kedua, adanya aktor yang memiliki kewenangan untuk menilai kepatuhan tersebut. Ketiga, adanya instrumen yang dapat memberikan konsekuensi apabila kewajiban tidak dipenuhi (Joachim et al. 2008). Ketiga hal tersebut digunakan untuk melihat apakah UN Women memiliki kemampuan untuk mendorong Pemerintah Yordania melalui mekanisme *enforcement* dalam pelaksanaan *Oasis Programme*.

3.1.1 *Naming & Shaming*

Naming and shaming merupakan salah satu instrumen *enforcement* yang dilakukan dengan mengungkapkan atau menilai ketidakpatuhan suatu negara untuk memberikan tekanan reputasional. Dalam kerangka Joachim, Reinalda, dan Verbeek (2008), mekanisme ini membutuhkan adanya standar atau kewajiban yang dapat digunakan untuk menilai kepatuhan serta aktor yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian tersebut.

Pada konflik Yordania, prasyarat tersebut tidak terpenuhi dalam pelaksanaan *Oasis Programme*. Yordania bukan negara yang terikat pada perjanjian internasional tentang status pengungsi tahun 1951 maupun Protokol 1967. Penanganan pengungsi di Yordania didasarkan pada *Memorandum of Understanding* antara Pemerintah Yordania dan UNHCR yang disepakati pada 1998 dan diamandemen pada April 2014. Kesepakatan tersebut mengadopsi definisi pengungsi dalam Konvensi 1951 dan prinsip *non-refoulement*, tetapi tidak memiliki mekanisme sanksi (Al-Kilani 2014).

Selain itu, kesepakatan tersebut merupakan perjanjian antara Pemerintah Yordania dan UNHCR, bukan UN Women. Dengan demikian, UN Women tidak memiliki posisi sebagai pihak yang dapat menggunakan kesepakatan tersebut untuk menilai kepatuhan Pemerintah Yordania. UN Women sendiri dibentuk melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 64/289 tahun 2010 dengan mandat untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women bukan merupakan badan yang bertugas mengawasi kepatuhan negara terhadap traktat (UN Women 2023).

Fungsi yang lebih dekat dengan mekanisme *naming and shaming* dalam isu hak perempuan di Yordania dilakukan oleh Komite CEDAW. Melalui *Concluding Observations* pada 2012 dan 2017, Komite CEDAW memberikan kritik terhadap ketentuan diskriminatif dalam *Personal Status Act* dan *Nationality Act* (CEDAW 2012, 2017). Namun, mekanisme tersebut berada di luar kewenangan UN Women dan tidak secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan *Oasis Programme*.

Dengan demikian, unsur *naming and shaming* memang dapat ditemukan dalam mekanisme perlindungan hak perempuan di Yordania, tetapi tidak menjadi instrumen yang digunakan UN Women dalam pelaksanaan *Oasis Programme*. UN Women tidak memiliki kewenangan untuk menilai kepatuhan Pemerintah Yordania dan memberikan tekanan reputasional kepada pemerintah melalui mekanisme tersebut.

3.1.2 *Sanction*

Selain *naming and shaming*, pendekatan *enforcement* juga dapat dilakukan melalui pemberian sanksi. Sanksi dapat berupa hukuman ekonomi, militer, maupun finansial yang diberikan ketika suatu negara tidak memenuhi kewajibannya (Joachim et al. 2008). Dalam kasus ini, penerapan sanksi juga tidak ditemukan dalam pelaksanaan *Oasis Programme* karena UN Women tidak memiliki kewenangan untuk memberikan konsekuensi kepada Pemerintah Yordania.

Pelaksanaan *Oasis Programme* justru bergantung pada kerja sama dengan pemerintah sebagai negara tuan rumah. Sebanyak 18 dari 22 *Oasis Centres* beroperasi dalam jaringan pusat komunitas *Ministry of Social Development*, dengan sebagian biaya operasional berasal dari anggaran nasional. Sementara itu, empat pusat lainnya berada di Kamp Za'atari dan Azraq yang pengelolaannya melibatkan *Syrian Refugee Affairs Directorate* (UN Women 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa UN Women membutuhkan akses dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk menjalankan program.

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program lebih banyak dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi daripada pemberian tekanan kepada pemerintah (UN Women 2024). Oleh karena itu, tidak terdapat instrumen sanksi yang digunakan UN Women untuk memaksa Pemerintah Yordania memenuhi suatu kewajiban dalam pelaksanaan *Oasis Programme*.

Terdapat beberapa kegiatan yang sekilas dapat terlihat seperti bentuk *enforcement*, seperti publikasi laporan evaluasi dan pelaporan berkala kepada *Ministry of Planning and International Cooperation* melalui mekanisme *Jordan Response Plan* (Ministry of Planning and International Cooperation (MoPIC) 2025). Namun, kedua kegiatan tersebut tidak digunakan untuk memberikan konsekuensi kepada pemerintah. Laporan evaluasi lebih berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas kepada donor dan publik, sedangkan pelaporan kepada MoPIC digunakan untuk koordinasi, perencanaan, dan pemantauan pendanaan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, pendekatan *enforcement* tidak menjadi pendekatan yang dominan dalam implementasi *Oasis Programme*. UN Women

tidak memiliki kewajiban traktat yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kepatuhan pemerintah, tidak memiliki kewenangan sebagai badan pengawas traktat, dan tidak memiliki instrumen sanksi yang dapat diberikan kepada pemerintah. Unsur *enforcement* tetap dapat ditemukan dalam mekanisme CEDAW, tetapi mekanisme tersebut berada di luar kewenangan UN Women dan tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan *Oasis Programme*.

3.2 Analisis Pendekatan *Management* UN Women melalui *Oasis Programme* dalam Melindungi Perempuan Pengungsi Suriah di Yordania

Pendekatan *management* adalah pendekatan yang menekankan bantuan dan penguatan kapasitas sebagai cara untuk meningkatkan kepatuhan terhadap norma internasional (Joachim et al. 2008). Solusi yang ditawarkan lebih menekankan pada pemantauan (*monitoring*) dan penguatan kapasitas (*capacity building*), bukan pada mekanisme pengawasan yang bersifat menghukum. Pandangan ini menjadi perbedaan utama antara pendekatan *management* dan *enforcement*. Keduanya sama-sama melibatkan pengumpulan informasi, tetapi memiliki tujuan dan dampak yang berbeda (Chayes and Chayes 1993). Penelitian ini menganalisis instrumen yang mencakup *monitoring* dan *capacity building* yang dijalankan melalui jaringan 22 *Oasis Centres* (UN Women 2024).

Oasis Programme mulai dijalankan pada tahun 2012 ketika UN Women membuka pusat pertamanya di Kamp Za'atari. Pada tahap awal, program ini berfokus pada bantuan darurat dan layanan bagi korban kekerasan berbasis gender bagi perempuan dan anak perempuan pengungsi (UN Women 2024). Seiring

waktu, cakupan program terus berkembang dari 4 pusat menjadi 22 pusat pada tahun 2023. Jaringan tersebut terdiri atas 4 pusat yang berlokasi di dalam kamp pengungsi Za'atari dan Azraq, serta 18 pusat yang tersebar di komunitas tuan rumah pada 11 provinsi di seluruh Yordania (UN Women 2024; UN Women Jordan, n.d.).

Jaringan 22 pusat ini dijalankan melalui kemitraan dengan Kementerian Pembangunan Sosial Yordania, bersama Kementerian Tenaga Kerja, badan-badan PBB lain seperti *World Food Programme*, UNHCR, dan UNICEF, organisasi masyarakat sipil seperti *Arab Renaissance for Democracy and Development* (ARDD) dan *Education for Employment* (EFE), serta jaringan sektor swasta melalui *Women's Empowerment Principles* (UN Women 2024). Luasnya kemitraan ini penting untuk dipahami karena menunjukkan bahwa pendekatan *management* dalam kasus ini tidak hanya dilakukan oleh UN Women, tetapi juga melalui kerja sama berbagai aktor yang memanfaatkan kapasitas kelembagaan pemerintah Yordania.

3.2.1 Monitoring sebagai Instrumen *Management* UN Women dalam Perlindungan Perempuan Pengungsi Suriah di Yordania

Monitoring merupakan proses pemantauan perilaku dan tindakan negara peserta suatu kesepakatan internasional, yang bisa dilakukan lewat laporan berkala negara, komite ahli yang menilai laporan tersebut, inspeksi langsung di lapangan oleh perwakilan organisasi internasional, atau laporan dari pihak luar seperti *shadow report*s (Joachim et al. 2008). Informasi yang diperoleh melalui

monitoring digunakan untuk membantu pengelola program mengambil keputusan dan melakukan perbaikan selama proses implementasi berlangsung, bukan untuk memberi tekanan dari luar. *Monitoring* dalam konteks *Oasis Programme* berfungsi sebagai instrumen *problem-solving* yang memungkinkan UN Women menyesuaikan layanan perlindungan dengan kebutuhan nyata perempuan pengungsi Suriah di Yordania (UN Women 2024).

UN Women menjalankan *monitoring* melalui kombinasi survei, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussions*), wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, serta sistem rujukan dan pencatatan kasus kekerasan berbasis gender di Kamp Za'atari dan Azraq (UN Women 2024). Evaluasi akhir periode 2021-2024 mencatat bahwa data dikumpulkan dari 375 responden (365 perempuan dan 10 laki-laki, termasuk 27 penyandang disabilitas) dari total populasi 5.101 penerima manfaat program, serta 130 peserta diskusi kelompok dan sejumlah wawancara dengan pemangku kepentingan (UN Women 2024). Data tersebut dianalisis menurut jenis kelamin, usia, kewarganegaraan, dan status disabilitas, serta menggunakan *Gender Results Effectiveness Scale* (GRES) untuk menilai kontribusi program terhadap kesetaraan gender.

Survei membantu UN Women melihat kondisi penerima manfaat secara umum, sementara diskusi kelompok dan wawancara memberikan informasi mengenai pengalaman dan kendala yang mereka hadapi. Penggunaan beberapa metode ini membuat UN Women dapat melihat masalah yang mungkin tidak terlihat dari hasil survei saja. Selain itu, data berdasarkan karakteristik penerima manfaat dapat digunakan untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan

kelompok yang masih tertinggal, bukan sekadar untuk menilai apakah suatu pihak telah mematuhi ketentuan yang ada (UN Women 2024).

Laporan evaluasi periode 2021–2024 menggunakan beberapa indikator untuk melihat hasil program. Data dibedakan berdasarkan jenis kelamin, usia, kewarganegaraan, dan status disabilitas. UN Women juga menggunakan *Gender Results Effectiveness Scale* untuk melihat hasil program dalam mendukung kesetaraan gender. Beberapa kegiatan berhasil mencapai target, bahkan melebihinya. Program *cash-for-work* menjangkau 2.099 penerima manfaat dari target 800 orang. Pelatihan untuk membuka dan menjalankan usaha juga diikuti 1.219 perempuan dari target 150 orang. Selain itu, 192 pejabat pemerintah daerah mengikuti pelatihan, dan tiga dokumen kebijakan berhasil disusun (UN Women 2024).

Namun, beberapa hasil belum mencapai target. Hanya 378 dari target 2.767 penerima manfaat yang masih bekerja 12 bulan setelah menyelesaikan program. Perempuan Suriah yang mendapatkan izin kerja mencapai 250 orang dari target 300 orang. Dalam hal keterlibatan dalam pengambilan keputusan di komunitas, 49% perempuan melaporkan adanya peningkatan, sedangkan 51% lainnya tidak mengalami perubahan yang berarti (UN Women 2024).

Hasil *monitoring* kemudian digunakan untuk melaksanakan penyesuaian program, salah satunya perpanjangan masa pelaksanaan program selama 9 bulan hingga akhir November 2024 berdasarkan keseepakatan dengan donor. Perpanjangan tersebut dilakukan setelah ditemukan beberapa target yang belum tercapai dalam waktu yang telah ditentukan. (UN Women 2024).

Berbeda dengan *monitoring* dalam pendekatan *enforcement* yang bekerja melalui pengumpulan data untuk menilai kepatuhan dan menjadi dasar pemberian sanksi atau tekanan reputasional terhadap aktor yang dianggap tidak patuh, *monitoring* dalam *Oasis Programme* mendorong perubahan melalui pembelajaran dan penyesuaian internal program (Joachim et al. 2008). *Management approach* berupaya memperbaiki pelaksanaan melalui penyediaan informasi, peningkatan kapasitas, dan penyesuaian program berdasarkan masalah yang ditemukan, bukan melalui konsekuensi terhadap pihak yang dianggap gagal memenuhi ketentuan. Sementara itu, *monitoring* dalam *enforcement* lebih menekankan fungsi pengawasan dan penilaian kepatuhan yang dapat berujung pada sanksi atau tekanan eksternal (Joachim et al. 2008). Oleh karena itu, dalam penelitian ini *monitoring Oasis Programme* dianalisis sebagai instrumen *management*.

Meskipun demikian, *monitoring* sebagai instrumen *management* juga memiliki keterbatasan. Data yang diperoleh melalui survei, sistem rujukan, maupun pencatatan kasus bergantung pada kasus yang dilaporkan dan partisipasi penerima manfaat (UN Women 2024). Akibatnya, informasi yang tersedia belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi yang dihadapi perempuan pengungsi Suriah, terutama dalam kasus kekerasan berbasis gender yang sering kali tidak dilaporkan. Penelitian di Yordania menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan lebih sering mencari bantuan melalui organisasi perempuan lokal karena dianggap lebih dapat dipercaya dibandingkan mekanisme formal organisasi internasional (Toukan 2023). Keterbatasan ini menunjukkan bahwa *monitoring* mampu menyediakan informasi penting bagi pengambilan keputusan,

tetapi tidak selalu dapat menangkap seluruh permasalahan yang terjadi di lapangan.

Selain monitoring internal melalui survei, sistem rujukan, dan laporan evaluasi program, UN Women juga menjalankan monitoring pada level koordinasi nasional melalui pelaporan berkala kepada *Ministry of Planning and International Cooperation* (MoPIC) dalam kerangka *Jordan Response Plan* (JRP). Pelaporan ini digunakan untuk memantau perkembangan pelaksanaan program serta kebutuhan pendanaan *Oasis Programme* dalam konteks respons nasional terhadap krisis pengungsi Suriah (Ministry of Planning and International Cooperation (MoPIC) 2025).

Dengan demikian, *monitoring* dalam *Oasis Programme* berjalan pada dua level, yaitu *monitoring* internal terhadap capaian dan kebutuhan program, serta *monitoring* koordinasi dengan pemerintah melalui kerangka JRP. Kedua level tersebut sama-sama digunakan untuk mendukung penyesuaian program dan keberlanjutan pendanaan, bukan untuk menilai atau menghukum kepatuhan pemerintah. Dengan kata lain, *monitoring* pada *management approach* tidak bertujuan untuk memberikan sanksi kegagalan dalam pelaksanaan, tetapi untuk mengetahui masalah yang terjadi dan memperbaiki program agar implementasi dapat berjalan lebih efektif (Joachim et al. 2008).

3.2.2 *Capacity Building* melalui Pelatihan Keterampilan, *Cash-for-Work,* dan Dukungan Psikososial oleh UN Women di Yordania

Capacity building adalah upaya organisasi internasional untuk membantu negara meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan dalam menjalankan kewajiban internasionalnya, baik dari sisi finansial, administratif, maupun teknis. Bantuan ini dapat diberikan dalam bentuk bantuan teknis karena organisasi internasional memiliki keahlian tertentu, bantuan finansial, serta bantuan dalam memahami dan memperjelas isi kesepakatan, termasuk ketika terjadi sengketa melalui mekanisme seperti negosiasi, mediasi, atau ajudikasi (Joachim et al. 2008). Dalam *Oasis Programme*, UN Women menerapkan *capacity building* pada dua tingkat, yaitu perempuan pengungsi Suriah sebagai penerima manfaat dan institusi pemerintah Yordania sebagai mitra pelaksana.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pelatihan keterampilan, program *cash-for-work*, dan dukungan psikososial yang saling berkaitan (UN Women 2024). Ketiga instrumen tersebut membentuk proses penguatan kapasitas yang terintegrasi. Pelatihan berperan dalam meningkatkan keterampilan dasar, *cash-for-work* memberikan kesempatan untuk menerapkan keterampilan dalam lingkungan kerja yang menghasilkan pendapatan, sedangkan dukungan psikososial membantu memperkuat kapasitas internal perempuan sehingga mereka dapat memanfaatkan kedua instrumen tersebut secara lebih optimal.

3.2.2.1 Pelatihan Keterampilan

Pada tingkat individu, pusat-pusat Oasis menyediakan berbagai pelatihan seperti menjahit, tata rias, bahasa, literasi keuangan, dan kewirausahaan. Pelatihan

tersebut membantu perempuan pengungsi memperoleh keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan atau mengembangkan usaha. Selain keterampilan kerja, pelatihan juga memberikan pengetahuan yang dapat mendukung perempuan dalam mengelola keuangan dan menjalankan usaha secara mandiri (UN Women 2024). Peran UN Women di sini lebih banyak berupa pemberian keterampilan dan dukungan agar perempuan memiliki kemampuan untuk memperoleh sumber penghasilan sendiri, bukan sekadar memberikan bantuan konsumtif (UN Women, 2024).

Pada tingkat kelembagaan, *capacity building* diarahkan kepada pejabat dan institusi pemerintah agar mereka memiliki kemampuan untuk menerapkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan. UN Women bersama *Arab Renaissance for Democracy and Development* (ARDD) melatih 192 pejabat pemerintah lokal pada 2021-2024, serta mendukung penyusunan tiga dokumen kebijakan terkait kekerasan berbasis gender, perlindungan sosial, dan ketenagakerjaan (UN Women, 2024). Pelatihan tersebut tidak hanya meningkatkan pengetahuan pejabat, tetapi juga membantu pemerintah memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk memasukkan kebutuhan perempuan ke dalam kebijakan dan layanan. Peran ini sesuai dengan karakter *management* yang mengutamakan penyelesaian masalah dan penguatan kapasitas daripada pemberian sanksi.

Pelatihan di Oasis juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi perempuan pengungsi. Bagi sebagian peserta, kegiatan tersebut menjadi tempat untuk membangun relasi sosial, meningkatkan rasa percaya diri, dan

mengembangkan kemampuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini dapat dipahami sebagai bentuk *everyday agency*, yaitu kemampuan perempuan untuk mengambil tindakan dan membuat pilihan dalam situasi yang memiliki berbagai keterbatasan (Kanal and Rottmann 2021). Pelatihan keterampilan berarti bukan hanya berkaitan dengan kesiapan kerja, tetapi juga memberi ruang bagi perempuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Namun, peningkatan kapasitas melalui pelatihan keterampilan tidak otomatis menjamin akses perempuan pengungsi terhadap pekerjaan atau sumber penghidupan yang berkelanjutan. Hambatan struktural seperti kebijakan ketenagakerjaan yang membatasi akses pengungsi terhadap pasar kerja formal, kondisi pasar kerja yang kompetitif, serta norma sosial yang membatasi mobilitas dan partisipasi ekonomi perempuan tetap berpengaruh di luar kendali langsung UN Women (UN Women 2024). Keterbatasan ini menunjukkan bahwa *capacity building* pada tingkat individu dan kelembagaan dapat memperkuat kemampuan perempuan dan pemerintah, tetapi dampaknya tetap dibatasi oleh kondisi struktural yang lebih luas.

3.2.2.2 *Cash-for-Work*

Cash-for-work merupakan bentuk perlindungan sosial yang ditujukan bagi masyarakat yang paling terdampak bencana. Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh penghasilan dalam waktu relatif cepat dengan bekerja dalam kondisi yang layak (International Labour Organization 2014). Sebagai

imbalannya, mereka terlibat dalam kegiatan pembersihan dan pemulihan wilayah yang terdampak bencana. Program ini umumnya berlangsung dalam jangka waktu terbatas, sebagai bantuan sementara bagi masyarakat hingga proses rehabilitasi jangka panjang berjalan dan kegiatan pekerjaan normal dapat kembali dilakukan (UNHCR 2025). *Cash-for-work* dalam *Oasis Programme* dapat dianalisis sebagai instrumen *capacity building* ekonomi yang memberikan kesempatan kerja berupah sekaligus memperkuat keterampilan dan kepercayaan diri perempuan pengungsi Suriah di Yordania (UN Women 2016).

Pelaksanaan program menunjukkan bahwa *cash-for-work* dapat menjawab kebutuhan ekonomi perempuan dalam kondisi pengungsian. Lokakarya menjahit dan salon di Kamp Zaatari merupakan program *cash-for-work* berfokus perempuan terbesar di kamp tersebut (UN Women 2024). Selama periode evaluasi 2021-2024, program *cash-for-work* di komunitas tuan rumah melampaui target sebanyak 2.099 penerima manfaat berbanding target 800 orang, sementara 1.219 perempuan mengikuti pelatihan membuka dan menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah. melampaui target 150 orang (UN Women 2024). Capaian tersebut menunjukkan bahwa program tidak hanya membantu perempuan memperoleh pendapatan, tetapi juga memberikan keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari atau menciptakan sumber penghasilan.

Dampak tersebut sejalan dengan temuan bahwa program *cash-for-work* di Yordania dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kohesi sosial, dan mendorong hubungan gender yang lebih setara di komunitas penerima (Zintl and Loewe 2022). Manfaat program juga terlihat dari penggunaan pendapatan yang diperoleh peserta, dimana tercatat bahwa perempuan di Kamp Zaatari

menggunakan sebagian besar pendapatan *cash-for-work* untuk membeli makanan segar dan produk kebersihan bagi keluarga (UN Women 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh juga membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dari sisi *management*, kondisi tersebut menunjukkan cara UN Women menggunakan bantuan ekonomi untuk merespons kebutuhan yang dihadapi perempuan sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam memperoleh pendapatan. Namun, data setelah program menunjukkan bahwa hasil *cash-for-work* belum sepenuhnya bertahan dalam jangka panjang. Hanya 378 dari target 2.767 penerima manfaat yang masih bekerja 12 bulan setelah menyelesaikan program, atau sekitar 14%. Jumlah perempuan Suriah yang memperoleh izin kerja juga mencapai 250 dari target 300 orang (UN Women 2024).

Rendahnya jumlah peserta yang tetap bekerja menunjukkan bahwa pemberian keterampilan dan kesempatan kerja belum cukup untuk menjamin keberlanjutan pekerjaan perempuan (UN Women 2024). Hambatan tersebut berkaitan dengan kondisi pasar kerja dan kebijakan izin kerja yang tidak sepenuhnya dapat diubah melalui program UN Women. Temuan ini mengindikasikan bahwa *cash-for-work* dalam *capacity building* perlu dipadukan dengan layanan lain, seperti penguatan kapasitas kelembagaan dan dukungan lanjutan, agar dampak pemberdayaan ekonomi dapat lebih berkelanjutan.

3.2.2.3 Dukungan Psikososial

Dukungan psikososial merupakan layanan yang bertujuan membantu individu atau kelompok menghadapi dampak psikologis dan sosial akibat konflik, kekerasan, pengungsian, serta kondisi krisis. Jika dilihat dari pendekatan *management*, layanan ini dapat digunakan untuk mengatasi hambatan non material yang dapat mengurangi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam program dan kehidupan sosial (Joachim et al. 2008). Dukungan psikososial dalam *Oasis Programme* dapat dianalisis sebagai instrumen *capacity building* non material yang cukup penting karena kondisi psikologis perempuan pengungsi tidak dapat dipisahkan dari pengalaman kekerasan, tekanan ekonomi, dan kehidupan dalam situasi pengungsian.

Kebutuhan tersebut terlihat dari sejumlah penelitian mengenai kondisi perempuan pengungsi Suriah di Yordania. Perempuan pengungsi yang mengakses layanan kesehatan menunjukkan masalah kesehatan mental yang berkaitan dengan pengalaman kekerasan, isolasi sosial, dan tekanan ekonomi (Brooks et al. 2022). Beban gangguan kesehatan mental pada perempuan pengungsi Suriah juga ditemukan lebih tinggi dibandingkan perempuan Yordania (Atrooz et al. 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa dukungan psikososial perlu mempertimbangkan pengalaman dan kondisi sosial perempuan pengungsi, bukan hanya menangani gejala kesehatan mental secara umum.

Di Kamp Azraq, dukungan psikologis dalam kelompok digunakan untuk membantu pengungsi menghadapi tekanan psikologis, sementara *narrative exposure therapy* digunakan untuk menangani pengalaman traumatis dan gejala

PTSD (Bryant et al. 2022; Smaik et al. 2023). Berbagai bentuk layanan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan psikososial perempuan pengungsi dapat muncul dalam bentuk yang berbeda, mulai dari tekanan psikologis hingga pengalaman kekerasan dan trauma. Karena itu, dukungan psikososial tidak dapat diberikan melalui satu bentuk layanan saja, tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat.

Dalam kerangka *capacity building*, dukungan psikososial berfungsi sebagai penguat kapasitas non-material yang memungkinkan perempuan memanfaatkan pelatihan dan *cash-for-work* secara lebih efektif. Kondisi psikologis yang lebih stabil meningkatkan kemampuan perempuan untuk mengikuti pelatihan dengan konsisten, mengambil keputusan terkait pekerjaan, dan mempertahankan partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dukungan psikososial dalam *Oasis Programme* menunjukkan bahwa pendekatan *management* tidak hanya berfokus pada kebutuhan ekonomi dan keterampilan, tetapi juga pada masalah psikologis dan sosial yang dapat menghambat kehidupan perempuan pengungsi (Joachim et al. 2008).

Namun, pelaksanaannya tetap menghadapi hambatan seperti stigma, keterbatasan tenaga profesional, akses layanan, dan keberlanjutan pendanaan (UN Women 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *management* dapat membantu menangani masalah yang dihadapi kelompok sasaran, tetapi pelaksanaannya tetap dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kelembagaan yang lebih luas.

3.3 Analisis Pendekatan *Normative* UN Women dalam Implementasi *Oasis Programme* bagi Perempuan Pengungsi Suriah di Yordania

Pendekatan *normative* adalah perspektif yang menekankan otoritas dan legitimasi Organisasi Internasional sebagai sumber kekuatan untuk mendorong negara mematuhi kesepakatan internasional. Pendekatan ini menggunakan argumen dan persuasi untuk meyakinkan negara bahwa memenuhi komitmen internasional merupakan tindakan yang tepat (Joachim et al. 2008). Berbeda dengan pendekatan *management* yang berfokus pada *monitoring* dan *capacity building*, pendekatan *normative* menekankan kemampuan organisasi internasional untuk membentuk perilaku aktor melalui kewenangan normatif yang diakui serta penerimaan terhadap peran dan nilai-nilai yang dibawa oleh organisasi tersebut. Dengan demikian, pengaruh organisasi internasional tidak hanya berasal dari kapasitas teknis yang dimilikinya, tetapi juga dari tingkat kepercayaan dan legitimasi yang diberikan oleh para aktor terhadap norma yang dipromosikan.

Pendekatan *normative* dalam konteks *Oasis Programme* ini digunakan untuk menganalisis bagaimana UN Women menggunakan *authority* dan *legitimacy* untuk menjalankan perannya sebagai pelaksana, fasilitator, dan mitra strategis dalam implementasi program bagi perempuan pengungsi Suriah di Yordania (UN Women 2024). Analisis ini tidak hanya melihat kegiatan yang dilakukan UN Women, tetapi juga bagaimana organisasi ini memposisikan diri dalam jaringan kemitraan, menyesuaikan program dengan konteks lokal, dan memperoleh penerimaan dari pemerintah Yordania serta perempuan pengungsi (UN Women 2024).

3.3.1 Authority dan Legitimacy UN Women dalam Implementasi *Oasis Programme* terhadap Pengungsi Suriah di Yordania

Authority merupakan kemampuan suatu aktor untuk mempengaruhi perilaku pihak lain tanpa menggunakan paksaan atau sanksi. *Authority* berbeda dengan *power* karena *power* dapat digunakan untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain (Joachim et al. 2008). Organisasi internasional pada umumnya tidak memiliki kekuatan untuk memaksa negara mengikuti keinginannya. Pengaruh organisasi internasional lebih banyak bergantung pada pengakuan terhadap kewenangan dan peran yang dimilikinya. *Authority* organisasi internasional tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan *legitimacy*.

Legitimacy adalah sejauh mana organisasi internasional beserta aturan dan norma yang dibawanya dianggap sah, kredibel, dan layak untuk diikuti oleh pihak-pihak yang menjadi sasarannya. Suatu organisasi dapat dikatakan memiliki *legitimacy* ketika pihak lain menerima keberadaannya dan menganggap perannya sesuai untuk dijalankan (Joachim et al. 2008). Penerimaan tersebut tidak selalu berarti bahwa semua tindakan organisasi harus disetujui. Pihak lain tetap dapat membatasi atau menolak sebagian tindakan organisasi sesuai dengan kepentingan dan kondisi mereka. *Legitimacy* tersebut biasanya terbentuk ketika proses yang dijalankan dianggap dapat memberi ruang kepada semua pihak, disepakati bersama, serta dilaksanakan secara netral dan tidak memihak.

Legitimacy membantu membentuk *authority* karena kewenangan suatu organisasi lebih mudah diterima ketika organisasi tersebut dianggap sah dan layak

menjalankan perannya. *Authority* kemudian memungkinkan organisasi mempengaruhi tindakan pihak lain melalui kewenangan yang diakui tersebut (Joachim et al. 2008). *Oasis Programme* menunjukkan bahwa *legitimacy* dan *authority* UN Women dapat dilihat melalui tiga hal, yaitu mandat formal, pengalaman teknis, dan posisi dalam jaringan kerja sama. Ketiga hal tersebut saling mendukung posisi UN Women dalam menjalankan program perlindungan dan pemberdayaan perempuan pengungsi Suriah di Yordania (JPOSC UN Women, n.d.; UN Women Jordan, n.d.).

Pertama, mandat formal UN Women sebagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 64/289 menjadi salah satu sumber *authority*. Negara-negara anggota PBB memberikan mandat kepada UN Women untuk menjalankan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perempuan (UN Women 2024). Mandat tersebut menjadi sumber *authority* karena memberikan dasar bagi UN Women untuk terlibat dalam isu perempuan pengungsi tanpa harus membangun kewenangan baru di setiap negara .

Kedua, pengalaman teknis UN Women dalam menjalankan *Oasis Programme* sejak tahun 2012 menunjukkan bahwa UN Women memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang perlindungan perempuan dan kesetaraan gender. Pengalaman tersebut diperoleh melalui pelaksanaan program bagi perempuan pengungsi di Kamp Za’atari dan Azraq. Berbagai kegiatan yang dijalankan meliputi penyediaan ruang aman, layanan rujukan kekerasan berbasis gender,

pelatihan keterampilan, *cash-for-work*, dan dukungan psikososial. (UN Women 2024). Pengalaman teknis ini memperkuat *authority* UN Women karena keahlian tersebut membuat pihak lain cenderung mengikuti rekomendasi dan pendekatan UN Women bukan karena paksaan, melainkan karena dianggap mampu menyesuaikan kebutuhan lapangan.

Ketiga, posisi dalam jaringan kerjasama turut memperkuat *authority* UN Women. Jaringan yang terdiri dari 22 *Oasis Centres* melibatkan kementerian pemerintah Yordania, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai badan PBB (UN Women 2024). Hubungan tersebut membuat UN Women tidak hanya berperan sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai koordinator dan mitra strategis dalam perlindungan serta pemberdayaan perempuan pengungsi.

Kerja sama dengan Kementerian Pembangunan Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, *Arab Renaissance for Democracy and Development*, serta badan PBB lainnya memberikan ruang bagi UN Women untuk membawa prinsip kesetaraan gender ke dalam kegiatan yang berkaitan dengan perempuan pengungs (UN Women 2024). Posisi dalam jaringan ini menghasilkan *authority* yang bersifat relasional, dimana semakin banyak aktor yang bergantung pada koordinasi UN Women, semakin besar pula pengaruh UN Women dalam menentukan arah dan prioritas program di lapangan.

Legitimacy UN Women dapat dilihat dari penerimaan terhadap peran organisasi tersebut oleh pemerintah Yordania dan perempuan pengungsi Suriah. Pemerintah Yordania menerima peran UN Women dalam dua hal, yaitu keterlibatan dalam kebijakan gender di tingkat nasional dan pelaksanaan *Oasis*

Programme. Pada tingkat nasional, UN Women terlibat dalam penyusunan *National Strategy for Women Action Plan 2023-2025* bersama dengan *Jordanian National Commission for Women* (JNCW), Kementerian Perencanaan dan Kerja Sama Internasional, Badan Pusat Statistik, serta *Higher Population Council* (Jordan National Comission for Women 2023).

Keterlibatan UN Women dalam penyusunan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa organisasi ini tidak hanya hadir sebagai pihak luar yang memberikan bantuan, tetapi juga dilibatkan dalam proses yang berkaitan dengan kebijakan gender di Yordania. Hal ini semakin terlihat dari peran UN Women dalam mendukung sistem pemantauan dan evaluasi implementasi *Jordan's National Action Plan on Women, Peace and Security* atau JONAP II yang dikelola oleh JNCW, dimana UN Women berperan menyediakan indikator dan kerangka evaluasi teknis untuk menilai capaian implementasi rencana aksi tersebut (Jordan National Comission for Women 2023). Peran ini penting sebagai bukti *legitimacy* karena JNCW, sebagai lembaga resmi pemerintah Yordania, secara sukarela melibatkan UN Women dalam fungsi pemantauan kebijakan nasional, bukan hanya sebagai pelaksana program di lapangan.

Penerimaan pemerintah Yordania terhadap peran UN Women terlihat dari keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan program dan perencanaan nasional. Dalam *Oasis Programme*, misalnya, 18 dari 22 *Oasis Centres* beroperasi dalam jaringan pusat komunitas *Ministry of Social Development* (MoSD) di 11 provinsi, dengan sebagian biaya operasional didukung oleh anggaran nasional. MoSD juga terlibat dalam penyusunan kriteria penerima manfaat, kebijakan terkait kekerasan

berbasis gender dan kesetaraan gender, serta evaluasi program melalui keterlibatan *Assistant Secretary General* MoSD sebagai anggota *Evaluation Reference Group* (UN Women 2024). Selain itu, program UN Women tercantum dalam *Jordan Response Plan* (JRP) yang dikoordinasikan oleh *Ministry of Planning and International Cooperation* (MoPIC). Hal ini menunjukkan bahwa UN Women tidak hanya dilibatkan dalam pelaksanaan program, tetapi juga diakui dalam perencanaan dan respons nasional Yordania terhadap krisis pengungsi Suriah (Ministry of Planning and International Cooperation (MoPIC) 2025; UN Women 2025).

Namun, penerimaan pemerintah Yordania terhadap peran UN Women tetap memiliki batas. Pemerintah lebih mudah menerima program, bantuan teknis, dan penguatan kapasitas, sementara agenda yang berkaitan dengan perubahan hukum lebih sulit diterima. Kritik terhadap ketentuan diskriminatif dalam *Personal Status Act* dan *Nationality Act* pada periode 2012-2017 menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan gender belum sepenuhnya diterapkan dalam hukum domestik Yordania (CEDAW 2012, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa *legitimacy* UN Women di tingkat pemerintahan tidak bersifat mutlak, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan serta kondisi politik dan kelembagaan pemerintah Yordania.

Legitimacy UN Women pada tingkat perempuan pengungsi dapat dilihat melalui keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan *Oasis Programme*. Perempuan pengungsi mengikuti pelatihan, menerima manfaat *cash-for-work*, dan menggunakan layanan dukungan psikososial yang disediakan melalui program tersebut (UN Women 2024). Manfaat yang dapat dirasakan secara langsung

memberikan alasan bagi perempuan untuk terlibat dalam kegiatan UN Women. Kegiatan tersebut juga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memperoleh keterampilan, membangun hubungan sosial, dan mengambil peran yang lebih aktif dalam kehidupan mereka (UN Women 2024).

Penerimaan dari perempuan pengungsi juga tidak dapat dianggap sama pada seluruh peserta. Data evaluasi menunjukkan bahwa 49% perempuan melaporkan adanya peningkatan partisipasi dalam badan pengambilan keputusan komunitas, sedangkan 51% lainnya tidak melaporkan perubahan yang berarti. Ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap peran dan nilai yang dibawa UN Women lebih tepat dipahami sebagai proses yang berlangsung secara bertahap (Kanal and Rottmann 2021; UN Women 2024).

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *Oasis Programme* mencerminkan pendekatan *normative* dalam pelaksanaan organisasi internasional. Pengaruh UN Women tidak berasal dari kemampuan memaksa, melainkan dari *authority* yang dibangun melalui *legitimacy*, keahlian teknis, dan posisinya dalam jaringan kemitraan. Melalui sumber-sumber otoritas tersebut, UN Women mampu menjalankan perannya sebagai pelaksana, fasilitator, dan mitra strategis dalam perlindungan serta pemberdayaan perempuan pengungsi Suriah di Yordania (UN Women 2024).

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Secara keseluruhan implementasi peran UN Women melalui *Oasis Programme* bagi perempuan pengungsi Suriah di Yordania dapat dipahami melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan *management* dan pendekatan *normative*. Rangkuman analisis mengenai peran, instrumen, hasil/dampak, dan keterbatasan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Kesimpulan

Dimensi Analisis	**PERAN UN WOMEN DALAM IMPLEMENTASI *OASIS PROGRAMME* TERHADAP PERLINDUNGAN PENGUNGSI PEREMPUAN SURIAH DI YORDANIA TAHUN 2023-2025**	
Pendekatan *Enforcement*	*Naming & Shaming*	UN Women tidak menggunakan *naming and shaming* karena tidak memiliki kewenangan untuk menilai kepatuhan Pemerintah Yordania dan memberikan tekanan reputasional. Mekanisme serupa dilakukan oleh Komite CEDAW, tetapi berada di luar kewenangan UN Women dan tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan *Oasis Programme*.
	Sanction	UN Women tidak menggunakan sanksi karena tidak memiliki kewenangan untuk memberikan konsekuensi kepada Pemerintah Yordania. Pelaksanaan *Oasis Programme* lebih mengandalkan kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah, terutama dalam penyediaan akses dan fasilitas program. Laporan evaluasi dan pelaporan kepada MoPIC digunakan untuk akuntabilitas dan koordinasi, bukan untuk memberikan sanksi.

Pendekatan *Management*	*Monitoring*	UN Women mengumpulkan data melalui survei, FGD, wawancara, sistem rujukan, dan pencatatan kasus di Kamp Za'atari dan Azraq untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan perempuan pengungsi. Namun, data masih bergantung pada kasus yang dilaporkan dan sebagian perempuan lebih memilih organisasi lokal.
	Capacity building	1. Pelatihan Keterampilan UN Women menyediakan berbagai pelatihan di 22 *Oasis Centres* untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas perempuan. Namun, keterampilan tersebut belum menjamin akses kerja karena masih terdapat hambatan struktural, seperti kondisi pasar kerja dan norma sosial. 2. *Cash-for-work* UN Women menyediakan program kerja berupah jangka pendek untuk membantu perempuan memperoleh pendapatan sekaligus meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri. Namun, dampaknya masih terbatas karena kendala izin kerja dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. 3. Dukungan Psikososial UN Women menyediakan dukungan psikososial melalui *Oasis Centres* berupa konseling, dukungan kelompok, dan terapi trauma untuk memperkuat kondisi psikologis perempuan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti stigma kesehatan mental, keterbatasan tenaga profesional, mobilitas, dan pendanaan.

Pendekatan *Normative*	*Authority dan Legitimacy*	UN Women menggunakan mandat PBB, pengalaman teknis, dan jaringan 22 *Oasis Centres* untuk mengarahkan program. Legitimasi sebagai bagian dari PBB memperkuat penerimaan UN Women sebagai aktor dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan pengungsi. Namun, *authority* UN Women tidak bersifat memaksa dan tetap bergantung pada penerimaan aktor domestik, sementara perubahan hukum dan partisipasi perempuan masih menghadapi keterbatasan.

4.2 Rekomendasi

Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa rekomendasi berdasarkan hasil analisis mengenai peran UN Women melalui *Oasis Programme* bagi perempuan pengungsi Suriah di Yordania. UN Women dan mitra pelaksana disarankan untuk memperkuat keberlanjutan program, khususnya melalui pendampingan ekonomi setelah pelatihan dan *cash-for-work,* penguatan layanan psikososial, serta peningkatan kerja sama dengan organisasi perempuan lokal. Selain itu, penulis juga merekomendasikan agar penelitian selanjutnya mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan pengungsi dalam komunitas serta efektivitas jangka panjang *cash-for-work* dan pelatihan keterampilan dalam mendukung kemandirian ekonomi perempuan pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

Acartürk, Cüneyt, M. Çetinkaya, İ. Şenay, B. Gülen, T. Aker, and D. Hinton. 2018. "Prevalence and Predictors of Posttraumatic Stress and Depression Symptoms among Syrian Refugees in a Refugee Camp." *The Journal of Nervous and Mental Disease* 206 (1): 40–45. https://doi.org/10.1097/NMD.0000000000000693.

Albadra, D., M. Vellei, D. Coley, and J. Hart. 2017. "Thermal Comfort in Desert Refugee Camps: An Interdisciplinary Approach." *Building and Environment* 124 (November): 460–77. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2017.08.016.

Alhasan, Nisrein, and Eid Kanaan. 2025. "The Living Conditions of Syrian Refugee Women in Zaatari Camp." *Discover Global Society* 3 (1): 37. https://doi.org/10.1007/s44282-025-00169-6.

Al-Hourani, Mohammed Abdel Karim, Abdel Baset Azzam, and Addison J. Mott. 2019. "SEXUAL HARASSMENT OF SYRIAN FEMALE YOUTH IN JORDANIAN REFUGEE CAMPS." *International Journal of Child, Youth and Family Studies* 10 (4.1): 24–43. https://doi.org/10.18357/ijcyfs104.1201919285.

Almasri, Shaddin. 2021. "The Political Economy of Nationality-Based Labor Inclusion Strategies: A Case Study of the Jordan Compact." *Middle East Critique* 30 (2): 185–203. https://doi.org/10.1080/19436149.2021.1911459.

Ammon News (Ammon News). 2025. "Ammonnews : Jordan's Response Plan Requirements for Syrian Crisis Reach $1.6 Billion in 2025." March 16. https://en.ammonnews.net/article/79982.

Asaf, Yumna. 2017. "Syrian Women and the Refugee Crisis: Surviving the Conflict, Building Peace, and Taking New Gender Roles." *Social Sciences* 6 (3): 110. https://doi.org/10.3390/socsci6030110.

Atrooz, Fatin, Sally Mohammad Aljararwah, Tzuan A. Chen, Omar F. Khabour, and Samina Salim. 2023. "Understanding Mental Health Status of Syrian Refugee and Jordanian Women: Novel Insights from a Comparative Study." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 20 (4): 2976. https://doi.org/10.3390/ijerph20042976.

BBC News. 2014. "Syria: The Story of the Conflict." Middle East. March 14. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868.

Brooks, Mohamad Adam, Melissa Meinhart, Luma Samawi, et al. 2022. "Mental Health of Clinic-Attending Syrian Refugee Women in Jordan:

Associations between Social Ecological Risks Factors and Mental Health Symptoms." *BMC Women's Health* 22 (1): 4. https://doi.org/10.1186/s12905-021-01584-y.

Brück, Tilman, Lucia C. Hanmer, Jeni Klugman, and Diana J. Arango. 2024. "Gender Dimensions of Forced Displacement: A Brief Review and Introduction to the Special Issue." *The Journal of Development Studies* 60 (12): 1839–51. https://doi.org/10.1080/00220388.2024.2376145.

Bryant, Richard A., Ahmad Bawaneh, Manar Awwad, et al. 2022. "Effectiveness of a Brief Group Behavioral Intervention for Common Mental Disorders in Syrian Refugees in Jordan: A Randomized Controlled Trial." *PLOS Medicine* 19 (3): e1003949. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003949.

CEDAW. 2012. "Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Jordan." Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), March 23. http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/JOR/CO/5.

CEDAW. 2017. "Human Rights Watch Submission to the CEDAW Committee of Jordan's Periodic Report, 66th Session." https://www.hrw.org/news/2017/01/23/human-rights-watch-submission-cedaw-committee-jordans-periodic-report-66th-session.

Chatty, Dawn. 2017. "The Syrian Humanitarian Disaster: Understanding Perceptions and Aspirations in Jordan, Lebanon and Turkey." *Global Policy* 8 (1): 25–32. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1758-5899.12390Digital Object Identifier (DOI).

Chayes, Abram, and Antonia H. Chayes. 1993. "On Compliance." *International Organization* 47 (2): 175–205. https://doi.org/10.1017/S0020818300027910.

European Commission. 2025. *Jordan*. Factsheet. European Commission. https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/where/middle-east-and-northern-africa/jordan_en.

FAFO and UNHCR. 2019. *The Living Conditions of Syrian Refugees in Jordan – Results from the 2017–2018 Survey*. Survey Report. https://data.unhcr.org/en/documents/details/67914.

General Assembly Adopts Consensus Text on System-Wide Coherence, Establishing Composite Entity — UN Women — to Accelerate Gender Equality, Empowerment (2010). https://press.un.org/en/2010/ga10959.doc.htm.

Gunawan, Yordan, Mhd Ervizal Rizqy Pane, and Muhammad Reza Athallah. 2023. “Chemical Weapons Violations in Syria’s Civil War: An International Law Perspective.” *Amnesti: Jurnal Hukum* 5 (1): 1–14. https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i1.2288.

Haider, Ahmad S., Saleh S. Olimy, and Linda S. Al-Abbas. 2021. “Media Coverage of Syrian Female Refugees in Jordan and Lebanon.” *Sage Open* 11 (1): 2158244021994811. https://doi.org/10.1177/2158244021994811.

Hinnebusch, Raymond. 2016. *After the Arab Uprisings: Between Democratization, Counter-Revolution and State Failure*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315622064.

Hoffmann, Sophia. 2017. “Humanitarian Security in Jordan’s Azraq Camp.” *Security Dialogue* 48 (2): 97–112. https://doi.org/10.1177/0967010616683311.

Human Rights Watch (Human Rights Watch). 2024. “World Report 2024: Syria.” https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/syria.

International Labour Organization. 2014. *Cash for Work: Pilot Programme 2013–2014 – Fiji and Solomon Islands Experience*. Pilot Programme Report. International Labour Organization. https://www.ilo.org/publications/cash-work-pilot-programme-2013-2014-fiji-and-solomon-islands-experience.

International Labour Organization (International Labour Organization). 2017a. “Jordan Issues First-of-Their-Kind Work Permits to Syria Refugees in the Arab Region.” August 9. https://www.ilo.org/resource/news/jordan-issues-first-their-kind-work-permits-syria-refugees-arab-region.

International Labour Organization (International Labour Organization). 2017b. “Syrian Refugees in Jordan Welcome Work Permits, but Challenges Persist | International Labour Organization.” June 28. https://www.ilo.org/resource/news/syrian-refugees-jordan-welcome-work-permits-challenges-persist.

International Rescue Committee (International Rescue Committee). 2025. “Shrinking Health Services Put Mothers and Newborns at Risk in Za’atari Refugee Camp, Warns the IRC | The IRC.” May 29. https://www.rescue.org/press-release/shrinking-health-services-put-mothers-and-newborns-risk-zaatari-refugee-camp-warns.

Jabbar, Sinaria Abdel, and Haidar Ibrahim Zaza. 2016. “Evaluating a Vocational Training Programme for Women Refugees at the Zaatari Camp in Jordan: Women Empowerment: A Journey and Not an Output.” *International Journal of Adolescence and Youth* 21 (3): 304–19. https://doi.org/10.1080/02673843.2015.1077716.

Joachim, Jutta, Bob Reinalda, and Bertjan Verbeek. 2008. *International Organizations and Implementation: Enforcers, Managers, Authorities?* Routledge.

Jordan National Comission for Women. 2023. *National Strategy for Women Action Plan 2023–2025*. Action Plan. Jordan National Comission for Women. https://women.jo/sites/default/files/2023-06/National%20Strategy%20for%20Women%20Action%20Plan%202023-2025_0.pdf.

Jordan Times (Jordan Times). 2025. "Jordan's 2025 Refugee Response Plan Seeks $1.6b amid Funding Decline." March 17. https://jordantimes.com//news/local/jordans-2025-refugee-response-plan-seeks-16b-amid-funding-decline-0.

JPOSC UN Women (UNDP). n.d. "United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women)." Accessed August 23, 2026. https://www.undp.org/jposc/united-nations-partnerships/unwomen.

Kanal, Maria, and Susan B. Rottmann. 2021. "Everyday Agency: Rethinking Refugee Women's Agency in Specific Cultural Contexts." *Frontiers in Psychology* 12 (November): 726729. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.726729.

Kheirallah, Khalid A., Sarah H. Al-Zureikat, Abdel-Hameed Al-Mistarehi, et al. 2022. "The Association of Conflict-Related Trauma with Markers of Mental Health Among Syrian Refugee Women: The Role of Social Support and Post-Traumatic Growth." *International Journal of Women's Health* 14 (September): 1251–66. https://doi.org/10.2147/IJWH.S360465.

Lamont, Christopher. 2022. *Research Methods in International Relations*. 2nd ed. SAGE Publications Ltd.

Lenner, Katharina, and Lewis Turner. 2019. "Making Refugees Work? The Politics of Integrating Syrian Refugees into the Labor Market in Jordan." *Middle East Critique* 28 (1): 65–95. https://doi.org/10.1080/19436149.2018.1462601.

Lister, Charles R. 2015. *The Syrian Jihad: Al-Qaeda, the Islamic State and the Evolution of an Insurgency*. Hust & Company.

Marks, Jesse (Carnegie Endowment for International Peace). 2024. "Syrian Refugees in Jordan: A Crisis of Dwindling Humanitarian Aid." January 9. https://carnegieendowment.org/sada/2024/01/syrian-refugees-in-jordan-a-crisis-of-dwindling-humanitarian-aid.

Ministry of Planning and International Cooperation (MoPIC). 2023. *Jordan Response Plan 2023 – Narrative Summary*. Narrative Summary. Ministry of Planning and International Cooperation.

https://mop.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_List_Page/JRP_2023_Narrative_Summary.pdf.

Ministry of Planning and International Cooperation (MoPIC). 2025. *Jordan Response Plan for the Syria Crisis 2025*. Narrative Summary. Ministry of Planning and International Cooperation. https://www.unhcr.org/sites/default/files/2025-01/Jordan%20-%20Strategy%202023%20%E2%80%93%202025_0.pdf.

Mustafa, Mays Ibrahim. 2023. "UNHCR in Jordan Faces Major Funding Shortfall for 2023, Affecting Refugee Assistance." Local. *Jordan Times*, November 6. https://jordantimes.com//news/local/unhcr-jordan-faces-major-funding-shortfall-2023-affecting-refugee-assistance.

Navarrete, Brisa Alexandra Merino. 2019. "Gender Based Violence against Female Syrian Refugees Living in Jordan." Master's thesis, Vrije Universiteit Amsterdam. https://bibalex.org/baifa/Attachment/Documents/c82GpoW2DI_20210525135317860.pdf.

Phillips, Christopher. 2016. *The Battle for Syria: International Rivalry in the New Middle East*. Yale University Press. https://doi.org/10.12987/yale/9780300217179.001.0001.

Sahin Mencutek, Zeynep, and Ayat J. Nashwan. 2021. "Perceptions About the Labor Market Integration of Refugees: Evidences from Syrian Refugees in Jordan." *Journal of International Migration and Integration* 22 (2): 615–33. https://doi.org/10.1007/s12134-020-00756-3.

Saleh, Ayman, Serdar Aydin, and Orhan Koçak. 2018. "A Comparative Study of Syrian Refugees in Turkey, Lebanon, and Jordan: Healthcare Access and Delivery." *OPUS International Journal of Society Researches* 8 (14): 448–64. https://doi.org/10.26466/opus.376351.

Smaik, Nadeen, Leigh Ann Simmons, Bayan Abdulhaq, and Latefa Ali Dardas. 2023. "The Feasibility and Preliminary Efficacy of Narrative Exposure Therapy on Post-Traumatic Stress Disorder among Syrian Refugees in Jordan." *International Journal of Nursing Sciences* 10 (4): 518–26. https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2023.09.007.

Small, Breanna. 2020. *"I Want to Continue to Study": Barriers to Secondary Education for Syrian Refugee Children in Jordan*. Human Rights Watch.

Toukan, Dima M. 2023. "Localizing Responses to Gender-Based Violence: The Case of Women-Led Community-Based Organizations in Jordan." *Daedalus* 152 (2): 167–78. https://doi.org/10.1162/daed_a_01998.

UN Women. 2015. *UN Women BRIEF – Thematic: Humanitarian*. Brief. https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Se

ctions/Library/Publications/2015/UN%20Women%20BRIEF_Thematic-Humanitarian_US-web.pdf.

UN Women. 2016. *Restoring Dignity and Building Resilience: Monitoring Report of UN Women's Programming in Za'atari Refugee Camp (June-October 2015)*. Monitoring Report. UN Women. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/3/restoring-dignity-and-building-resilience-in-jordan.

UN Women. 2024a. *Evaluation of Resilience and Empowerment of Vulnerable Women: The Future of Jordan's Growth and Stability (EUTF Madad Phase 2)*. Final Evaluation / Programme Evaluation. https://www.unevaluation.org/member_publications/evaluation-resilience-and-empowerment-vulnerable-women-future-jordans-growth.

UN Women. 2024b. *In Brief: Resilience and Empowerment of Vulnerable Women: The Future of Jordan's Growth and Stability (January–December 2023)*. In Brief. UN Women. https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2024/04/in-brief-resilience-and-empowerment-of-vulnerable-women-the-future-of-jordans-growth-and-stability-january-december-2023.

UN Women. 2024c. *Resilience and Empowerment of Vulnerable Women – The Future of Jordan's Growth and Stability (EUTF Madad Phase 2), Jordan*. Final Evaluation Report. Jordan. https://gate.unwomen.org/EvaluationDocument/Download?evaluationDocumentID=10389.

UN Women (UN Women – Headquarters). 2024d. "Women Rise from Poverty and Gain Economic Independence through Oasis Centres in Jordan." March 4. https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2024/02/women-rise-from-poverty-and-gain-economic-independence-through-oasis-centres-in-jordan.

UN Women. 2025. *Jordan Country Office Strategic Note 2023–2027: Annual Reporting*. Strategic Note 2023–2027. UN Women Transparency Portal. https://open.unwomen.org/en/country-results/JO.

UN Women Jordan (UN Women – Arab States). 2020. "From Where We Stand: Our Journey of Resilience and Empowerment between Two Crises." June 18. https://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2020/06/from-where-we-stand--our-journey-of-resilience-and-empowerment-between-two-crises-.

UN Women Jordan (UN Women – Arab States). n.d. "Areas of Work and Programmes - Jordan." Accessed August 23, 2026. https://arabstates.unwomen.org/en/countries/jordan/areas-of-work-and-programmes.

UNHCR (UNHCR). 2014. “145,000 Syrian Refugee Women Fight for Survival as They Head Families Alone.” https://www.unhcr.org/news/news-releases/145000-syrian-refugee-women-fight-survival-they-head-families-alone.

UNHCR. 2024. *Vulnerability Assessment Framework: Socio-Economic Survey of Refugees in Camps – Jordan, June 2024*. Survey Report. https://reliefweb.int/report/jordan/vulnerability-assessment-framework-socio-economic-survey-refugees-camps-jordan-june-2024-0.

UNHCR. 2025. *UNHCR Jordan 2024 Annual Assessment Report - Basic Needs Cash Assistance Programme - Jordan*. UNHCR. https://reliefweb.int/report/jordan/unhcr-jordan-2024-annual-assessment-report-basic-needs-cash-assistance-programme.

UNHCR Jordan (UNHCR Jordan). n.d. “Partners.” Accessed August 23, 2026. https://www.unhcr.org/jo/about-us/partners.

UNHCR and World Bank. 2025. *Enhanced Regional Survey on Syrian Refugees’ Perceptions and Intentions on Return to Syria: Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon*. Survey Report. Geneva. https://data.unhcr.org/en/situations/syria?Lang=EN.

UNICEF Jordan. 2019. *Study on the Underlying Social Norms and Economic Causes That Lead to Child Marriage in Jordan*. UNICEF Jordan.

World Bank (World Bank). 2016. “Economic Opportunities for Jordanians and Syrian Refugees- Questions and Answers.” Text/HTML. June 28. https://www.worldbank.org/en/country/jordan/brief/economic-opportunities-for-jordanians-and-syrian-refugees-questions-and-answers.

Zintl, Tina, and Markus Loewe. 2022. “More than the Sum of Its Parts: Donor-Sponsored Cash-for-Work Programmes and Social Cohesion in Jordanian Communities Hosting Syrian Refugees.” *The European Journal of Development Research* 34 (3): 1285–307. https://doi.org/10.1057/s41287-022-00536-y.